PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL SEKITAR WISATA
STUDI KASUS DI WANA WISATA PULOMERAH
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN
KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Oleh:

DESI RIRI PUTRIANI

NIM. 115080413111006

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL SEKITAR WISATA
STUDI KASUS DI WANA WISATA PULOMERAH
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN
KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh:

DESI RIRI PUTRIANI

NIM. 115080413111006

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SKRIPSI

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL SEKITAR WISATA STUDI KASUS DI WANA WISATA PULOMERAH DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI

Oleh:

DESI RIRI PUTRIANI

NIM. 115080413111006

telah dipertahankan didepan penguji

pada tanggal 9 Juli 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Dosen Penguji I **(Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP)** **NIP. 19610417 199003 1 001** **Tanggal:**	**Dosen Pembimbing I** **(Dr.Ir. Edi Susilo, MS)** **NIP. 19591205 198503 1 003** **Tanggal:**
Dosen Penguji II **(Wahyu Handayani, S.Pi, MBA, MP)** **NIP. 19750310 200501 2 001** **Tanggal:**	**Dosen Pembimbing II** **(Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si)** **NIP. 19740220 200312 2 001** **Tanggal:**

Mengetahui,
Ketua Jurusan

(Dr.Ir. Nuddin Harahab, MP)
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal:

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang peengetahuan saya juga tidak terdapat kaya atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Malang, Juli 2015

Mahasiswa

Desi Riri Putriani

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan terselesaikannya laporan ini banyak pihak yang telah ikut membantu, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT Sang Pemilik Pengetahuan, yang selalu memberikan berkah yang tidak ternilai dan selalu memberikan kekuatan kepada penulis dalam menghadapi segala kesulitan selama penelitian berlangsung dan selama proses pengerjaan laporan ini.
2. Sujud dan terima kasih yang dalam penulis persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, atas dorongan yang kuat, kebijaksanaan, dan do'a.
3. Dr. Ir. Edi Susilo, MS selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, informasi serta waktu untuk membimbing sehingga laporan ini dapat diselesaikan.
4. Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, informasi serta waktu untuk membimbing sehingga laporan ini dapat diselesaikan.
5. Sahabat terdekat saya dan teman-teman Agrobisnis Perikanan 2011 yang telah banyak membantu dalam proses pengerjaan laporan Skripsi.

Malang, Juli 2015

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

DESI RIRI PUTRIANI. Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Sekitar Wisata (Studi Kasus Di Wana Wisata Pulomerah Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Edi Susilo, MS** dan **Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si**)

Perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang lebih diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. (Gillin dan Gillin dalam Soekanto, 1982). Perubahan sosial dapat terjadi diseluruh kalangan masyarakat, dalam penelitian ini kawasan yang diamati sebagai tempat penelitian adalah kawasan Wana Wisata Pulomerah, kawasan wisata tersebut telah menjadi tempat diselenggarakannya kejuaran *surfing* internasional sejak tahun 2013.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses perubahan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat lokal sekitar wisata serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Wana Wisata Pulomerah Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi selama bulan April 2015.

Metode penelitian yang digunakan yakni metode studi kasus dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengambilan data dilakukan dengan observasi keadaan sekitar dan hubungan antar masyarakat, wawancara mendalam terhadap informan, serta dokumentasi data-data pendukung penelitian. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Pada penelitian ini diketahui bahwa masyarakat sekitar tidak mengalami perubahan pada struktur sosial kehidupan mereka. Tatanan masyarakat, hubungan timbal-balik antar masyarakat dalam kehidupan sosialnya serta dalam kehidupan beragamanya tidak terjadi perubahan sosial yang mencolok. Informan menjabarkan bahwa meskipun terdapat kerenggangan antar masyarakat karena adanya konflik namun hal tersebut tidak bertahan lama dan tidak sampai menyebabkan perubahan sosial yang menjadikan terpecahnya tatanan kehidupan sosial masyarakat Pulomerah.

Adanya kegiatan wisata di kawasan Pulomerah dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa masyarakat sekitar wisata mengalami perubahan sosial terhadap gaya hidup mereka. Perubahan-perubahan yang terjadi seperti pada gaya bahasa yang digunakan sehari-hari, kegiatan *surfing* yang menjadi kegiatan harian saat ini, serta pada penggunaan teknologi.

Adanya perubahan alih fungsi lahan hutan lindung menjadi kawasan wisata maka masyarakat mengalami perubahan dengan menyesuaikan diri beralih pekerjaan. Hasil dari penelitian ini yakni masyarakat juga mengalami perubahan sosial dalam hal pekerjaan. Masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan dari hasil penelitian perubahan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat sekitar Pulomerah terjadi karena faktor-faktor yang

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

mempengaruhi seperti konflik antar kelompok dalam masyarakat, intervensi dari pihak pemerintah kabupaten, kontak dengan kebudayaan lain yakni adanya wisatawan asing yang datang ke Pulomerah, orientasi masa depan masyarakat Pulomerah yang ingin kehidupan lebih baik, serta keinginan masyarakat untuk berubah seperti pada gaya hidup sehari-hari.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kegiatan wisata di Pulomerah menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pulomerah. Dampak positif yang terjadi yakni kesadaran masyarakat tentang kebersihan, budaya dan adat masyarakat yang terus dipertahankan, mengalami perubahan penggunaan bahasa yang lebih halus dalam bercakap, peningkatan pendapatan, terbukannya lowongan pekerjaan baru. Dampak negatif yang ditimbulkan berupa alih fungsi lahan hutan lindung menjadi kawasan wisata, kehidupan sosial masyarakat yang awalnya sosialis menjadi lebih individualis, psikologi remaja yang dapat terpengaruh karena adanya pennjualan minuman keras.

Pada penelitian ini saran yang dapat diberikan adalah masyarakat tetap mempertahankan dan melesatarikan warisan budaya, pemerintah tetap memperhatikan masyarakat dalam membuat kebijakan dan melakukan pengawasan secara berkala agar kesejahteraan masyarakat tetap terkontrol, diharapkan ada penelitian mendalam selanjutnya untuk perubahan sosial masyarakat perikanan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu penulis dapat menyajikan Laporan Skripsi yang berjudul **Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Sekitar Wisata (Studi Kasus Di Wana Wisata Pulomerah Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi).** Di dalam tulisan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi Proses Perubahan Sosial, Dampak Sosial Ekonomi masyarakat sekitar wisata . Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangtepatan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, Juli 2015

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

RINGKASAN i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN viii

I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Kegunaan Penelitian 6

II. TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 Konsep Pariwisata 7
2.2 Konsep Perubahan Sosial 9
2.3 Proses Perubahan Sosial 11
2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Perubahan Sosial 12
2.5 Pengertian Dampak 15

III. METODE PENELITIAN 18
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 18
3.2 Obyek dan Subyek Penelitian 18
3.3 Jenis Penelitian 19
3.4 Teknik Pengumpulan Data 19
3.4.1 Observasi 19
3.4.2 Wawancara 20
3.4.3 Dokumentasi 21
3.5 Teknik Analisa Data 21

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 23
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 23
4.1.1 Kondisi Geografis dan Topografi 23
4.1.2 Keadaan Penduduk 25
4.1.3 Profil Wana Wisata Pulomerah 26
4.2 Proses Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Pulomerah 36
4.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Pulomerah 49
4.3 Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Pulomerah 51

V. KESIMPULAN DAN SARAN 56
5.1 Kesimpulan 56
5.2 Saran 56

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA **58**

LAMPIRAN **60**

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Analisis Data 22
2. Luas Wilayah Desa Sumberagung Berdasarkan Penggunaan Lahan 24
3. Rincian Jumlah Penduduk Desa Sumberagung 25
4. Mata Pencaharian Pokok Desa Sumberagung 26
5. Kualitas Angkatan Kerja Desa Sumberagung 26
6. Jumlah fasilitas di Wana Wisata Pulomerah 28
7. Pendapatan Bulanan Wana Wisata Pulomerah dari Oktober 2014-Maret 2015 31
8. Harga sewa jasa usaha wisata di kawasan Pulomerah 32
9. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Wana Wisata Pulomerah 35
10. Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Pulomerah 55

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Peringkat nilai devisa pariwisata 3
2. Kerangka Pemikiran (Dimodifikasi dari hubungan faktor-faktor, proses dan dampak perubahan sosial Kanto, 2011) 17
3. Peta lokasi penelitian (Pantai Pulau Merah dengan 18
4. Peta menuju lokasi penelitian Pantai Pulomerah di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran 23
5. Wana Wisata Pantai Pulau Merah 27
6. Potensi lain yang dapat dinikmati di Pulomerah (kanan atas Pulomerah saat surut, kiri atas keindahan *sunset*, kanan bawah kegiatan *surfing*, kiri bawah hutan lindung) 28
7. Upara Melasti menjelang Hari Raya Nyepi di Pulomerah 40
8. Kegiatan *surfing* yang dilakukan wisatawan dan masyarakat sekitar 44
9. Warung Semi Permanen 46
10. Pos Tiket Masuk 46
11. Toko Souvenir, Payung Teduh, dan *Home Stay* 47

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN **HALAMAN**

1. Tabel Ranking Nilai Devisa Pariwisata 60
2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 61

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada dikawasan Asia Tenggara. Menurut Salim (2002) ada 5 faktor penggerak utama bagi negara berkembang dalam proses perubahan sosial yakni **Informasi dan Komunikasi**, **Birokrasi**, **Teknologi**, **Modal**, dan **Ideologi-agama**. Kelima faktor tersebut masing-masing memiliki peranan yang sangat kuat dalam proses perubahan sosial. Kelimanya merupakan faktor eksternal perubahan sosial yang datangnya bukan dari masyarakat itu sendiri melainkan dari luar lingkungan masyarakat.

Perubahan sosial bisa terjadi diseluruh kalangan masyarakat, misalnya saja pada kalangan masyarakat pesisir. Pembangunan pesisir menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakatnya, menurut Salim (2002) pembangunan merupakan proses perencanaan sosial yang dilakukan oleh birokrat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Menurut Sukmara dan Crowford (2002) perbandingan perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku sosial masyarakat desa Talise, Sulawesi Utara sebagai desa proyek pembangunan pesisir dengan desa kontrol disekitar desa tersebut yang tidak mendapat intervensi dari proyek pesisir, memiliki perbedaan persepsi yang sangat signifikan tentang kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan mengenai masa depan yang lebih baik.

Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah membawa peran penting dalam mempengaruhi persepsi masyarakat yang dapat menyebabkan perubahan sosial dan secara tidak langsung membuktikan peran pemerintah atau birokrasi dalam kehidupan sosial masyarakatnya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Peran pemerintah dalam hal birokrasi mempengaruhi perubahan sosial masyarakat juga terjadi di Muncar, Banyuwangi. Menurut Resi, Zauhar, dan Ismani (2009) peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) kaitannya dengan interaksi birokrasi pemerintah dalam pembangunan masyarakat pesisir. LSM bertindak sebagai mediator antara masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk memecahkan masalah. LSM dan pemerintah bersama-sama melakukan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat pesisir.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dilihat peran pemerintah atau birokrasi sangat besar dalam mempengaruhi terjadinya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat pesisir. Salah satu kawasan pesisir yang menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji adalah kawasan pantai. Pantai merupakan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai objek pariwisata.

Sektor pariwisata di Indonesia dianggap sebagai satu aset yang sangat berharga dan bernilai, oleh karena itu pembangunan di sektor ini terus ditingkatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Daya saing pariwisata Indonesia dengan negara-negara lain cukup memuaskan dengan berada diposisi 81 setelah Singapore, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam berdasarkan hasil survei World Economic Forum dalam harian Kompas (Bagus, 2013). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat nilai devisa yang dihasilkan oleh sektor pariwisata dalam menyumbang perekonomian nasional.

Sektor pariwisata berada di peringkat keempat setelah minyak dan gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit dengan nilai nominal yang cukup

besar. Peningkatan nilai devisa sektor pariwisata dapat dilihat pada grafik dibawah ini, sedangkan data lengkapnya dapat dilihat pada tabel dilampiran 1.

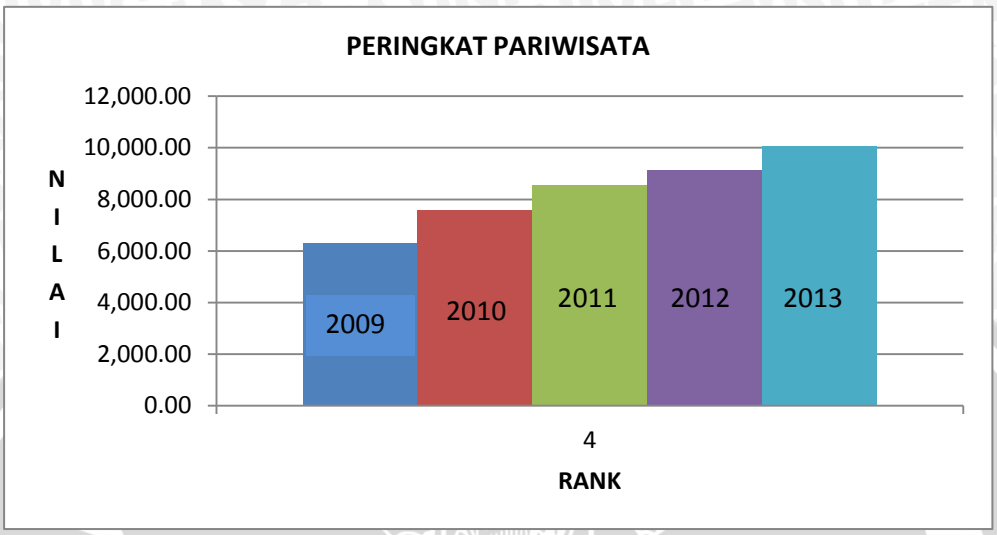

Gambar 1. Peringkat nilai devisa pariwisata

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2013

Namun meskipun nilai devisa sektor pariwisata menunjukkan angka kenaikan yang berarti menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi nasional tidak menutup kemungkinan bahwa ada dampak lain yang dihasilkan oleh sektor pariwisata. Menurut Hartono (1974) dalam Luthfi (2013) pariwisata memiliki tiga aspek pengaruh yang ditimbulkan dalam masyarakat yakni aspek ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), aspek sosial (penciptaan lapangan kerja, perubahan sosial), dan aspek budaya.

Menurut Irianto (2011) dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat pariwisata di Gili Trawangan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak ekonomi memiliki pengaruh yang positif yakni meningkatnya pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat lokal yang tidak tamat sekolah. Namun dampak sosial yang ditimbulkan adalah berubahnya nilai-nilai budaya masyarakat lokal karena cenderung meniru perilaku wisatawan asing yang tidak sesuai dengan nilai budaya masyarakat Indonesia.

Prayogi (2011) juga menyebutkan hal sama dengan Irianto bahwa perkembangan objek wisata Penglipuran, Bali menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif terhadap kehidupan sosial dan budaya adalah keinginan masyarakat untuk melestarikan warisan budaya leluhur mereka agar menjadi daya tarik wisatawan dan munculnya sentra-sentra kerajinan tangan, namun dari hal tersebut muncul dampak negatif yakni adanya komersialisasi budaya lokal yang mereka miliki, masyarakat lebih fokus mencari uang untuk kebutuhan hidup keluarganya dan menjadikan mereka lebih individualistis. Cara penanggulangan dampak negatif dengan meningkatkan pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pelestarian alam dan budaya, pelatihan-pelatihan informal dan peningkatan keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan pariwisata.

Dampak sosial yang terjadi akibat masuknya budaya asing dalam kebudayaan masyarakat lokal membawa pengaruh yang sangat besar dalam terjadinya perubahan sosial masyarakat. Sari (2007) mengemukakan bahwa adanya pariwisata buatan Taman Safari II Prigen di Desa Jatirejo, Pasuruan berkontribusi besar dalam mempengaruhi perubahan sosial masyarakat desa Jatirejo.

Beberapa perubahan positif antara lain meningkatnya pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan lain, terjadinya pembangunan di daerah sekitar pariwisata, berubahnya pola pikir masyarakat yang dulunya tidak mementingkan pendidikan sekarang menyadari betapa pentingnya sekolah. Namun dampak negatif yang ditimbulkan berada pada lingkungan sekitar. Lahan yang digunakan untuk membangun kawasan pariwisata dulunya adalah lahan pertanian, dengan adanya pembangunan lahan pertanian menjadi lebih sempit.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dipastikan bahwa pariwisata dapat membawa pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat

sekitar dan membawa dampak langsung atau tidak langsung. Namun dalam penelitian ini peneliti berusaha melihat proses perubahan sosial itu sendiri, selain itu dampak yang sudah timbul atau bahkan dampak yang akan ditimbulkan dikemudian hari. Penelitian ini akan dilaksanakan di Wana Wisata Pulomerah Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Wana Wisata Pulomerah ini sudah menjadi tujuan para wisatawan lokal sejak tahun 2002, namun pada tahun 2013 lalu pantai ini dijadikan tempat Kejuaraan *Surfing* Internasional oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Acara ini dijadikan sebagai agenda tahunan yang diadakan setiap satu tahun sekali. Kegiatan ini melibatkan sekitar 15 negara dari belahan dunia seperti Australia, Amerika, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Jerman, Italia, Swedia, Brazil, Portugal, Perancis, Austria, Belanda, dan Afrika Selatan memberikan minat tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung.

Adanya kegiatan pariwisata di Pantai Pulomerah ini akan menyebabkan terjadinya proses perubahan sosial yang akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar wisata. Penelitian ini akan mencoba menganalisis proses perubahan sosial tersebut dan dampak sosial ekonomi yang telah timbul maupun yang akan timbul dikemudian hari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses perubahan sosial terjadi dalam masyarakat lokal sekitar Wana Wisata Pulomerah?
2. Bagaimanakah dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat kegiatan pariwisata di Wana Wisata Pulomerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal sekitar Wana Wisata Pulomerah
2. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat kegiatan pariwisata di Wana Wisata Pulomerah

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Masyarakat Sekitar Wana Wisata Pulomerah sebagai rujukan untuk melihat proses perubahan sosial serta dampak sosial yang terjadi didalam kelompoknya dari kegiatan pariwisata
2. Pemerintah sebagai acuan pengambilan kebijakan dalam pengembangan kawasan ekowisata pantai Pulomerah
3. Akademisi atau peneliti sebagai informasi keilmuwan untuk menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan serta sebagai bahan informasi guna penelitian lebih lanjut bagi pihak mahasiswa, dosen, balai riset maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, definisi pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Yoeti (1989) pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk mencari nafkah, melainkan untuk menikmati perjalanan dan memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Pengertian lain juga dijelaskan oleh Pendit (1999) yang menyebutkan bahwa pariwisata merupakan suatu industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan, serta stimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Pengertian tersebut lebih terfokus pada segi ekonomi, Robert McIntosh bersama Shashikant Gupta dalam Pendit (1999) mencoba mengurai pengertian pariwisata sebagai gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan dan para pengunjung lain.

Wisatawan merupakan orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah menuju daerah lain untuk sementara waktu dengan harapan mendapat kenikmatan dari hal-hal baru yang dialami selama perjalanan (Cohen, 1974 dalam Noerhadi, 1998). Hal-hal baru yang dialami oleh para wisatawan salah satunya adalah interaksi dengan para masyarakat lokal yang bertempat tinggal didaerah sekitar tempat wisata. Adanya interaksi antara wisatawan dan

masyarakat lokal tidak menutup kemungkinan terjadinya proses perubahan sosial.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diambil pengertian bahwa pariwisata merupakan kegiatan perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain yang dilakukan sementara waktu dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan hal-hal baru dalam perjalanan yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi tuan rumah tujuan wisata.

Perkembangan wisata dari tahun ke tahun semakin pesat dan kunjungan wisatawan asing juga semakin meningkat. Pada awalnya hal ini diyakini tidak mengganggu kondisi lingkungan dan tidak menyebabkan polusi. Namun, pada kenyataannya semua yang dilakukan wisatawan di tempat wisata ditemukan berbagai aktivitas yang dapat mengganggu ekosistem lingkungan, terutama ekosistem daerah tujuan wisata. Berdasarkan masalah tersebut mendorong berbagai pihak berusaha meminimalisir berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan wisata dengan adanya ekowisata.

Nugroho (2011) menguraikan beberapa pengertian tentang ekowisata dalam bukunya yang berjudul “Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan” misalnya menurut *The International Ecotourism Society* atau ITES (1991), Ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah alami dalam rangka mengkonservasi atau menyelamatkan lingkungan dan memberi penghidupan penduduk lokal.

Menurut *World Conservation Union* (WCU) ekowisata merupakan perjalanan ke wilayah-wilayah yang alamnya masih asli, dengan menghargai berbagai warisan budaya yang berada di lingkungan tersebut, mendukung upaya-upaya konservasi lingkungan alamnya, meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi kepada

masyarakat lokal. Berdasarkan kedua pengertian tersebut memiliki makna yang hampir sama, keduanya sama-sama mengikutkan peran masyarakat lokal sebagai objek dan subjek dalam kegiatan berpariwisata.

Konsep ekowisata sangat baik jika diterapkan dalam kegiatan berpariwisata karena konsep ini diharapkan dapat menimbulkan berbagai dampak positif kepada masyarakat, lingkungan serta pemerintah yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya.

2.2 Konsep Perubahan Sosial

Setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan itu dapat terjadi dari dalam diri manusia itu sendiri atau karena adanya faktor lain diluar kelompok masyarakat tersebut. Perubahan dapat terjadi secara cepat, namun juga dapat terjadi secara lambat atau perlahan. Perubahan-perubahan masyarakat dapat berupa nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat dan lain sebagainya (Soekanto, 1982).

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan yakni (1) perbedaan; (2) pada waktu berbeda; (3) diantara keadaan sistem sosial yang sama (Sztompka, 1993).

Konsep perubahan sosial lain juga diungkapkan oleh Kanto (2011) yakni “perubahan” berhubungan dengan proses, perbedaan, dan dimensi waktu. Perubahan sosial menunjuk pada suatu proses sistem sosial dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang dikehendaki, seperti pembangunan dan perubahan yang tidak dikehendaki.

Berdasarkan kedua konsep yang telah diuraikan diatas sama-sama memiliki tiga gagasan yang menjadi landasan dalam konsep perubahan sosial. Namun, ada sedikit yang berbeda yakni Sztompka menguraikan perubahaan sosial terjadi dalam keadaan sistem sosial yang sama sedangkan Kanto mengungkapkan adanya proses dalam terjadinya perubahan sosial.

Gillin dan Gillin mengartikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang lebih diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Sedangkan Soemardjan menjelaskan lebih rinci yakni perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat (dalam Soekanto, 1982).

Davis (1960) mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Moore (1967) mefokuskan perubahan sosial dalam struktur sosial, yakni pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Rogers mendefinisikan perubahan sosial yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial. Perubahan pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial terjadi karena kegiatan-kegaiatan seperti revolusi, pembangunan, penemuan-penemuan baru dalam industri (dalam Wahyu, 2005).

Pengertian yang dapat dirangkai berdasarkan pendapat-pendapat yang muncul perubahan sosial adalah proses perubahan dalam berbagai aspek sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat dengan keadaan sistem sosial yang sama dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Salim (2002) terdapat *Five Contemporary Prime Mover* atau lima faktor penggerak utama dalam konsep perubahan sosial di Indonesia. Kelimanya

adalah Komunikasi dan Industri Pers, Birokrasi, Modal, Teknologi, serta Ideologi (Pancasila) dan Agama. Masing-masing dari faktor tersebut sangat berpengaruh dalam perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan di Wana Wisata Pulomerah yang telah dikunjungi wisatawan sejak tahun 2002 dan ditetapkan sebagai tempat Kejuaraan *Surfing* Internasional pada tahun 2013 ini pengaruh birokrasi oleh pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadi pada masyarakat lokal sekitar tempat tersebut.

Penelitian ini berusaha melihat perubahan sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata di Wana Wisata Pulomerah. Bagaimana proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal dengan adanya kegiatan tersebut dan perubahan sosial yang diamati berupa perubahan dalam struktur sosial masyarakat, gaya hidup, dan pekerjaan .

2.3 Proses Perubahan Sosial

Menurut Roy Baskhara (1984) dalam Salim (2002) proses perubahan sosial meliputi proses *reproduction* dan proses *transcormation*. Proses *reproduction* adalah proses mengulang-ulang, menghasilkan kembali segala hal yang diterima dari warisan nenek moyang sebelumnya, sedangkan proses *transcormation* adalah suatu proses penciptaan suatu hal yang baru.

Proses perubahan sosial secara *reproduction* norma-norma dan nilai-nilai budaya yang telah didapat dari nenek moyang diulang-ulang secara terus menerus menjadi sebuah kebudaayaan atau adat. dalam proses perubahan secara transcormation norma-norma dan nilai-nilai budaya sulit untuk dirubah (cenderung dipertahankan) karena menjadi landasan dalam kehidupan sosialnya.

Parsons meyebutkan ada 4 jenis proses dalam perubahan sosial yakni proses keseimbangan, perubahan struktural, diferensiasi struktural, dan evolusi.

Proses kesimbangan mengacu pada proses yang membantu dalam mempertahankan batas-batas sistem. Proses tersebut terjadi secara statis dan dinamis yang berjalan secara terus-menerus (Wahyu, 2005).

Pendapat lain keluar dari Rogers yang menyebutkan bahwa proses perubahan sosial dapat dikategorikan menjadi 3 yakni inovasi (penemuan baru), difusi, dan akibat. Inovasi merupakan suatu proses bagaimana gagasan baru diciptakan dan dikembangkan. Difusi merupakan suatu proses bagaimana gagasan baru tersebut disebarluaskan dalam sistem sosial, dan akibat (*consequences*) merupakan hasil diterima atau ditolaknya gagasan baru tersebut dalam sistem sosial (Wahyu, 2005).

Sedangkan menurut Soekanto (1982) proses-proses perubahan sosial meliputi (1) penyesuaian masyarakat terhadap perubahan yakni keserasian atau kesimbangan sosial yang terjadi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berfungsi dan saling mengisi. (2) saluran-saluran dalam proses perubahan, merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam segala bidang misalnya pemerintahan, ekonomi, rekreasi dan seterusnya yang menjadi titik tolak *cultural focus* pada masa tertentu. (3) disorganisasi (proses pudarnya norma-norma dan nilai-nilai budaya akibat perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan), dan Reorganisasi (proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar sesuai dengan lembaga kemasyarakat yang mengalami perubahan).

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Perubahan Sosial

Menurut Soekanto (1982), dalam proses perubahan sosial ada 2 faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial tersebut, yakni faktor pendorong dan faktor penghambat jalannya proses perubahan sosial.

Faktor pendorong jalannya proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain:

a. Kontak dengan kebudayaan lain

   Adanya kontak dengan kebudayaan lain menghasilkan proses difusi, yakni proses menyebarnya unsur-unsur budaya baru dalam masyarakat

b. Sistem pendidikan formal yang maju

   Pendidikan yang baik serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin mempercepat proses modernisasi

c. Sikap saling menghargai hasil karya orang lain dan keingan untuk maju

   Apabila sikap tersebut melembaga pada masyarakat maka proses penemuan-penmuan hal-hal baru akan semakin cepat karena masyarakatlah yang menjadi pendorongnya

d. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang

   Adanya proses difusi dari kebudayaan lain yang masuk dalam masyarakat akan semakin menimbulkan sikap toleransi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, misalnya cara berpakain, pergaulan muda-mudi, dll

e. Sistem terbuka lapisan masyarakat

   Sistem terbuka dapat memberikan kesempatan kepada individu untuk maju atas dasar kemauan sendiri

f. Penduduk heterogen

   Penduduk yang memiliki latar belakang, ras, suku yang berbeda akan cenderung mengalami pertentangan-pertentangan yang mengundang kegocangan yang mendorong perubahan-perubahan

g. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu

Ketidakpuasan yang berlangsung terlalu lama dalam masyarakat berkemungkinan menimbulkan revolusi

h. Orientasi ke masa depan

i. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar memperbaiki hidupnya

Faktor-faktor yang menghambat jalannya proses perubahan sosial dalam masyarakat antara lain:

a. Kurangnya hubungan antar masyarakat

Kondisi geografis yang terisolir menyebabkan masyarakat kurang mengetahui perkembangan-perkembangan diluar daerahnya yang mungkin dapat memperkaya kebudayaannya sendiri. Hal itu menyebabkan masyarakat terkunkung dengan pola-pola pemikiran tradisi yang sudah ada

b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat

Hal ini mungkin disebabkan hidup masyarakat tersebut terasing dan tertutup atau mungkin karena lama dijajah oleh masyarakat lain seperti masyarakat Indonesia pada zaman dulu

c. Sikap masyarakat yang sangat tradisional

Suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau serta anggapan bahwa tradisi secara mutlak tak dapat diubah dapat memperlambat jalannya proses perubahan

d. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau *vested interests*

Dalam setiap oraganisasi sosial yang mengenal sistem lapisan pasti akan ada sekelompok orang yang menikmati kedudukan perubahan-perubahan. Sekelompok orang yang memiliki kepentingan tersendiri inilah yang dapat menghambat jalannya proses perubahan sosial

e. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan

f. Prasangka terhadap hal-hal baru atau sikap tertutup

Sikap tertutup banyak dijumpai pada kalangan masyarakat yang pernah dijajah bangsa Barat. Mereka sangat mencurigai sesuatu yang berasal dari Barat adalah hal buruk yang harus dikhawatirkan jika masuk kedalam budaya mereka

g. Hambatan ideologis

Setiap usaha perubahan pada unsur-unsur kebudayaan rohaniah biasanya diartikan sebagai usaha yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang sudah menjadi dasar integrasi masyarakat tersebut

h. Nilai pasrah terhadap nasib

2.5 Pengertian Dampak

Menurut Vanclay (2003) konsep dampak sosial akan menyebabkan perubahan dalam beberapa hal, seperti gaya hidup, budaya, kelompok masyarakat, sistem politik, pemerintahan, serta kesehatan dan kesejahteraan. Maka dari itu analisis mengenai dampak sosial sangat penting untuk dilakukan, karena dampak sosial tidak dapat dilihat secara langsung.

Menurut Soemarwoto (2009) dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut bisa berasal dari alam atau berasal dari manusia. Beberapa contoh dampak yang berasal dari aktivitas alam adalah dengan adanya gunung merapi meletus menyebabkan kerusakan pada daerah letusannya, sedangkan contoh dari aktivitas manusia adalah dengan adanya pariwisata.

Pariwisata dapat menimbulkan dampak yang bersifat sosial-ekonomi dan budaya. Dampak pembangunan pariwisata menurut Soemarwoto (2009) adalah berubahnya nilai budaya yang ada dalam masyarakat lokal dan ditirunya tingkah

laku para wisatawan oleh penduduk. Berubahnya nilai budaya masyarakat sangat erat kaitannya dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat karena perubahan tersebut salah satu indikator perubahan sosial.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) dalam Irianto (2011), dampak berarti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Kaitannya dalam melihat perubahan sosial yang terjadi akibat pembangunan ekowisata Pantai Pulomerah dampak yang terjadi di lingkungan dapat diminimalisir, namun dampak budaya yang terjadi dalam masyarakat masih belum dapat ditentukan secara langsung.

Konsep ekowisata memang lebih menguntungkan lingkungan, namun tidak dapat menahan interaksi antara penduduk lokal dengan wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang datang ke objek wisata. Secara umum dalam Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan adalah perubahan yang tidak dapat direncanakan (Soemarwoto, 2009).

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual yang saling berhubungan dengan identifikasi sebagai masalah penelitian. Kegiatan pariwisata yang ada di kawasan Wana Wisata Pulomerah menjadi salah satu ikon internasional yang dapat menyebabkan perubahan sosial dikalangan masyarakat lokal sebagai tuan rumah menjadi topik yang akan diangkat dalam penelitian ini. Datangnya wisatawan menyebabkan interaksi sosial antara masyarakat lokal dan wisatawan yang dapat menyebabkan diserapnya unsur-unsur budaya yang dibawa wisatawan ke tempat pariwisata oleh masyarakat lokal.

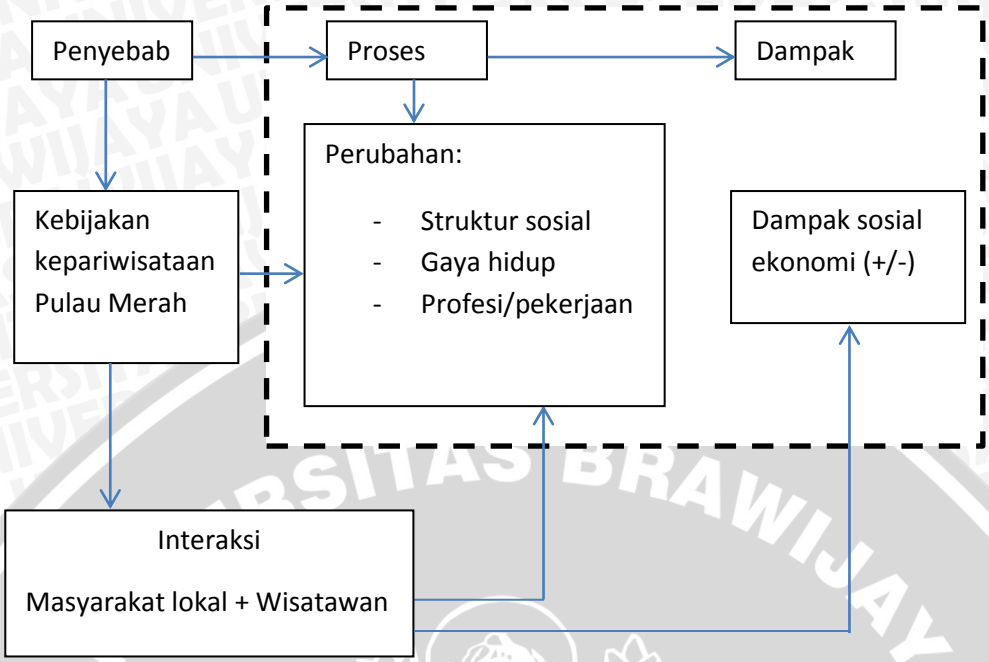

Keterangan : → = hubungan pengaruh

= fokus penelitian

Gambar 2. Kerangka Pemikiran (Dimodifikasi dari hubungan faktor-faktor, proses dan dampak perubahan sosial Kanto, 2011)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wana Wisata Pulomerah Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur (gambar dapat dilihat dibawah ini). Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 05-15 April 2015.

Gambar 3. Peta lokasi penelitian (Pantai Pulau Merah dengan lingkaran hitam)

3.2 Obyek dan Subyek Penelitian

Menurut Sudiro (2012) objek penelitian dapat diartikan pula topik penelitian. Sedangkan subjek penelitian adalah sumber tempat peneliti memperoleh keterangan penelitian. Penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah perubahan sosial masyarakat lokal sekitar Wana Wisata Pulomerah. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat lokal yang mendiami daerah sekitar Wana Wisata Pulomerah, pengelola wana wisata Pulomerah, serta Perhutani.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Yin (2013) menjelaskan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata, seperti siklus kehidupan seseorang, proses-proses organisasional dan manjerial, perubahan lingkungan sosial, hubungan-hubungan internasional, dan kematangan industri-industri.

Sedangkan dalam pengolahan data digunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriftif kualitatif digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Peneliti bertindak sebagai pengamat dan hanya membuat kategori pelaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi (Sudiro, 2012)**.** Penelitian ini berusaha mengetahui dan menganalisa bagaimana proses perubahan sosial akibat pariwisata terjadi serta dampak sosial ekonomi apa yang ditimbulkan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi menurut Black dan Champion (1992) adalah mengamati (*watching*) dan mendengarkan (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis. Tujuan utama observasi adalah untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual, yang memungkinkan kita memandang tingkah laku sebagai proses.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi kondisi sekitar wilayah penelitian seperti tata letak sarana dan prasarana, kegiatan yang

dilakukan masyarakat seperti kegiatan *surfing* dan kegiatan keagamaan, serta hubungan antar masyarakat untuk melihat apakah kegiatan pariwisata mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sekitar.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden dan merupakan cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan (Marzuki, 1983).

Penentuan sampel pengumpulan data informan yang akan diwawancarai menggunakan *purposive sampling* yaitu peneliti menentukan sendiri siapa yang akan dijadikan informan dalam penelitian. Metode ini dipilih karena populasi yang akan diselidiki kurang jelas jadi penentuan sampel ditentukan oleh penyelidik.

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada masyarakat sekitar yang menjadi informan kunci untuk melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang diambil secara *purposive sampling* yakni Ibu Dariyah (36 tahun) sebagai pemilik warung untuk mengetahui proses perubahan sosial dalam tatanan masyarakat, Fitri (17 tahun) sebagai penjaga pos tiket untuk mengetahui pandangan anak muda dengan adanya kegiatan pariwisata dikawasan tempat tinggalnya, Pak Rakeh (40 tahun) sebagai ketua pengelola Wana Wisata Pulomerah untuk mengetahui sejarah terbentuknya Pulomerah serta keadaan Pulomerah dulu sampai sekarang dan kehidupan masyarakat sekitar Pulomerah sebelum dan sesudah dibukanya kegiatan wisata. Pak Edy (38 tahun) sebagai perwakilan dari pihak Perhutani yang bekerja sama dengan masyarakat dan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan Pulomerah. Pak Bambang (25 tahun) sebagai penjaga pos tiket masuk dan pengurus retribusi tiket untuk melihat proses perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat sekitar.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Nazir (1999), data berupa dokumen bisa dipakai menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.

Data berupa dokumen dalam penelitian ini didapat dari kantor kelurahan Desa Sumberagung yang berisi tentang informasi pertumbuhan jumlah penduduk, jenis pekerjaan, letak geografis pantai Pulomerah, potensi wilayah, serta potensi sumberdaya manusia. Data lain diambil dari pihak Perhutani yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar dan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan Wana Wisata Pulomerah yang berupa salinan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perhutani dan Dinas Pariwisata, data jumlah pendapatan Pulomerah dari bulan Oktober 2014 sampai Maret 2015, data jumlah pengunjung Pulomerah, serta data harga tiket masuk, harga karcis parkir, harga sewa warung, pedagang kaki lima (PKL), pedagang asongan dan *home stay*.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisa data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian (Zulfa, 2013).

Analisa deskriptif diartikan melukiskan variabel – variabel satu demi satu dengan tujuan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek – praktek yang berlaku, membuat perbandingan masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan keputusan pada waktu yang akan datang (Rakhmat, 1998).

Penelitian ini menggunakan analisa data deskritif kualitatif. Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati (Taylor dan Bogdan, 1984 dalam Agusta, 2003). Sedangkan menurut Sitorus (1998) dalam Agusta (2003) Data kualitatif adalah data mentah dari dunia empiris.

Data kualitatif beruwujud uraian terinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita terbuka (*open-ended narrative*) tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori baku yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan yang telah diajukan pada pedoman pertanyaan. Berikut merupakan tabel analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang akan dilakukan:

Tabel 1. Analisis Data

Tujuan penelitian	**Komponen yang Diteliti**	**Sumber data**	**Analisis Data**
Mengetahui proses perubahan sosial akibat kegiatan pariwisata	- Proses perubahan struktur sosial, gaya hidup, pekerjaan - Kebijakan yang diberikan pemda untuk kegiatan pariwisata - Pertumbuhan jumlah penduduk	- Masyarakat sekitar pantai Pulomerah - Pengelola pantai Pulomerah - Dinas pariwisata - Perhutani - Kantor kelurahan	- Deskriptif Kualitatif
Menganalisa dampak sosial ekonomi akibat kegiatan pariwisata	- Dampak sosial - Dampak ekonomi	- Masyarakat lokal sekitar	- Deskriptif kualitatif

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis dan Topografi

Kabupaten Banyuwangi merupakan ujung timur dari pulau Jawa yang berada di Provinsi Jawa Timur. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan dengan panjang sekitar 175,8 km. Salah satu desa yang berada di daerah garis pantai yang memiliki potensi wisata adalah Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran gambar wilayah dapat dilihat dibawah ini.

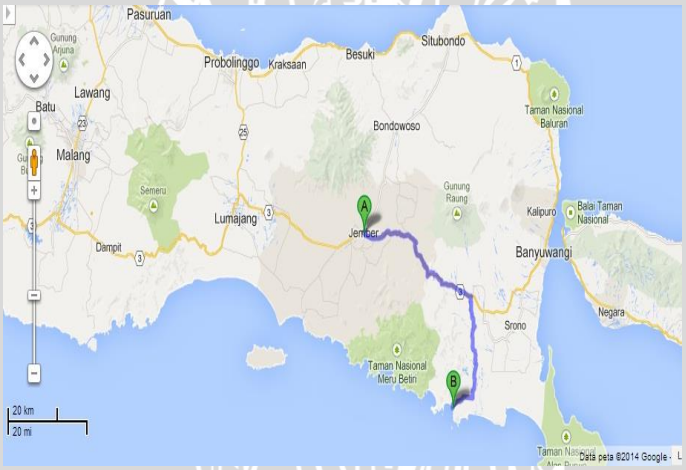

Gambar 4. Peta menuju lokasi penelitian Pantai Pulomerah di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran

Secara administratif Desa Sumberagung memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah timur : Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran
- Sebelah barat : Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran

Luas wilayah Desa Sumberagung sekitar 1.967 ha/m^2 berdasarkan luas wilayah menurut penggunaannya. Ketinggian tempat 27 meter dari permukaan laut (mdl) dengan jumlah bulan hujan sepanjang 6 bulan dan suhu rata-rata harian yakni 29-32°C.

Jarak ke ibukota kecamatan kurang lebih 0,300 km dan jarak ke ibukota kabupaten 70 km, terdapat kendaraan umum yang melintas ke ibukota kabupaten sebayak 7 unit yang memudahkan akses warga sekitar. Desa Sumberagung berada pada daerah dataran rendah dengan beberapa desa dalam kawasan pantai/pesisir, kawasan rawan banjir serta terdapat beberapa desa dengan potensial tsunami.

Rincian luas wilayah Desa Sumberagung berdasarkan penggunaan lahannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Luas Wilayah Desa Sumberagung Berdasarkan Penggunaan Lahan

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (ha/m^2)
1.	Pemukiman	500
2.	Persawahan • Sawah irigasi teknis • Sawah irigasi setengah teknis • Sawah tadah hujan	 450 50 40
3.	Tegal/lading	100
4.	Perkebunan • Negara • Swasta	 1000 1000
5.	Fasilitas umum • Kas desa • Lapangan olahraga • Perkantoran pemerintah • Ruang publik/taman kota • Pasar	 20,5 3 2,5 1 0,5
6.	Lain-lain • Pemakaman	 1
Total luas		3168,5

Sumber: Kantor Kepala Desa Sumberagung, 2014

4.1.2 Keadaan Penduduk

Berdasarkan data kependudukan yang ada di data base kelurahan Desa Sumberagung pada tahun 2014, jumlah penduduk Desa Sumberagung sebanyak 13.652 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.676 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 6.976 orang. Jumlah kepala keluarga sebanyak 4.723 Kepala Keluarga (KK). Rincian jumlah penduduk Desa Sumberagung dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3. Rincian Jumlah Penduduk Desa Sumberagung

No.	Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	6.676	49,65
2.	Perempuan	6.976	50,35
Total		13.652	100

Sumber: Kantor Kepala Desa Sumberagung, 2014

Masyarakat Desa Sumberagung berasal dari etnis dan agama yang berbeda. Sebagian besar masyarakatnya asli dari etnis jawa, sedangkan yang lain dari etnis Madura dan Bali. Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sumberagung juga sangat beragam yakni sebanyak 12.788 orang beragama Islam, 261 orang beragama Kristen, 352 orang beragama Hindu, dan 251 orang beragama Budha. Meskipun berasal dari etnis dan agama yang berbeda-beda kehidupan serta kerukanan masyarakat tetap terjaga dan saling menghargai.

Pendidikan di Desa Sumberagung juga sudah baik tapi masih banyak masyarakat yang hanya tamat SD dan SMP hanya sebagian kecil yang melanjutkan pendidikan formal sampai tamat sarjana. Tingkat pendidikan formal yang ditunjukkan oleh data base kelurahan Desa Sumberagung juga mempengaruhi mata pencaharian para masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat Desa Sumberagung bermata pencaharian sebagai petani, mata pencaharian pokok masyarakat lainnya ditunjukkan oleh Tabel 4 dibawah ini.

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Sumberagung juga dapat dilihat kualitas angkatan kerjanya. Tabel 5 yang menunjukkan kualitas angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa penduduk usia 18-56 tahun yang tamat perguruan tinggi hanya 400 orang yang berarti hanya 2,9 % dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Sumberagung.

Tabel 4. Mata Pencaharian Pokok Desa Sumberagung Berdasarkan Kategori

No	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Wiraswasta	4.101	5.112
2	Pegawai Negeri Sipil	65	8
3.	Karyawan perusahaan swasta	500	350
4.	Bidan swasta	-	2
5.	Perawat swasta	-	3
Jumlah total orang		4.666	5.475
Jumlah total jenis mata pencaharian		5 jenis	

Sumber: Kantor Kepala Desa Sumberagung, 2014

Tabel 5. Kualitas Angkatan Kerja Desa Sumberagung Berdasarkan Pendidikan

No	ANGKATAN KERJA (usia 18-56 tahun)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Buta aksara dan huruf/angka latin	50 orang	41 orang
2.	Tidak tamat SD	1.650 orang	1.775 orang
3.	Tamat SD	1.655 orang	1.550 orang
4.	Tamat SLTP	1.381 orang	1.504 orang
5.	Tamat SLTA	1.746 orang	1.850 orang
6.	Tamat perguruan tinggi	150 orang	250 orang
	JUMLAH	6.632 orang	6.970 orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Sumberagung, 2014

4.1.3 Profil Wana Wisata Pulomerah

4.1.3.1 Keadaan Umum Wana Wisata Pulomerah

Pulomerah merupakan tempat wisata yang masuk dalam kawasan Desa Sumberagung. Pulomerah terletak pada titik koordinat 8°36′18.4″ LS dan 114°01′31.8″BT, berada di pesisir Samudera Hindia. Lokasi Pulomerah ini berada di sebelah barat dari Pantai Rajegwesi (Taman Nasional Meru Betiri), dan timur Taman Nasional Alas Purwo. Pulomerah dan sekitarnya merupakan kawasan lindung.

Pulomerah menyuguhkan keindahan panorama pantai dengan hamparan pasir putih seluas 3 km dan sebuah pulau yang berdiri tegak sejauh 300 meter dari garis pantai. Pulomerah memiliki tanah yang berwarna merah karena itu disebut sebagai Pulomerah. Pulau ini kurang lebih seluas 4 ha dan berbukit setinggi sekitar 200 m.

Luas keseluruhan kawasan wisata Pulomerah ini sekitar 6,8 ha yang terbagi 2 petak yakni 70 m luas 3,46 ha RPH Pulomerah BKPH Sukamade dan petak 75 m luas 3,40 ha RPH Kesilir Baru BKPH, karena kawasan Pulomerah termasuk dalam kawasan milik Perhutani maka dalam pengelolaan pun yang bertanggungjawab secara penuh adalah dari pihak Perhutani. Namun, dalam pelaksanaan Perhutani tetap melibatkan masyarakat di dalamnya. Gambar Wana Wisata Pulomerah dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 5. Wana Wisata Pantai Pulau Merah

Wisata ke Pulomerah tidak hanya dapat melihat hamparan pasir putih luas yang sangat indah, namun masih ada potensi lain yang dapat menjadi daya tarik wisatawan yakni seperti panorama atau keindahan *sunset* (matahari tenggelam) yang sangat memanjakan mata, ombak harian yang sangat bersahabat ± 2 m dan menarik untuk digunakan sebagai tempat *surfing*, atraksi menyebrang ke Pulomerah saat laut surut, dan hutan lindung yang berdampingan dengan pantai. dibawah ini beberapa gambar potensi lain dari Pulomerah yang dapat dinikmati pengunjung.

Gambar 6. Potensi lain yang dapat dinikmati di Pulomerah (kanan atas Pulomerah saat surut, kiri atas keindahan *sunset*, kanan bawah kegiatan *surfing*, kiri bawah hutan lindung)

Selain potensi-potensi tersebut Pulomerah juga ditunjang oleh berbagai fasilitas yang memadai agar pengunjung lebih nyaman dalam menikmati wisata di kawasan ini. Berbagai fasilitas ini disediakan oleh pihak pengelola serta terdapat fasilitas yang disediakan langsung oleh masyarakat sekitar Pulomerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Jumlah fasilitas di Wana Wisata Pulomerah

No	Jenis fasilitas	Jumlah (unit)	Keterangan	Gambar
1.	Musholah	1	Milik pengelola wisata	
2.	Ponten/kamar mandi	10	Milik pengelola wisata	

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (unit)	Keterangan	Gambar
3.	Warung	40	Milik warga	
4.	Pusat Informasi	1	Milik pengelola wisata	
5.	Toko souvenir	1	Milik pengelola wisata	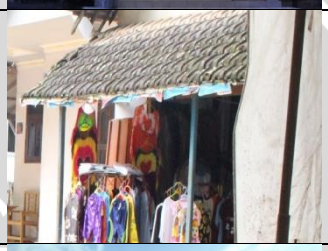
6.	Payung teduh	35	Milik warga	
7.	Menara pandang	1	Milik pengelola wisata	
8.	Parkir wisata	1 (4 ha)	Milik pengelola wisata	
9.	*Home stay*	20	Milik warga	

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (unit)	Keterangan	Gambar
10.	Gazebo/tempat duduk	15	Milik pengelola wisata	
11.	Pos tiket	1	Milik pengelola wisata	
JUMLAH		**127**		

Sumber: Kantor Pengelola Wana Wisata Pulomerah, 2014

Perkembangan wisata Pulomerah bukan tanpa masalah, masih ada beberapa masalah yang harus dihadapi oleh pengelola demi perbaikan Pulomerah kedepannya, seperti: parkir kendaraan yang terlalu dekat dengan pantai, area pandan laut dipakai untuk berjualan, memiliki sejarah bencana tsunami, dan pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertata rapi. Beberapa masalah itu saat ini mulai akan diperbaiki dengan melakukan pengembangan-pengembangan potensi.

Pengembangan yang telah dilakukan diantaranya adalah perbaikan dan pelebaran jalan menuju lokasi oleh Pemkab Banyuwangi untuk memperpendek waktu tempuh, Pulomerah berjarak sekitar 100 km dari Kabupaten Jember, saat ini Pulomerah dapat ditempuh dalam waktu 60 menit dari Kecamatan Genteng dengan rambu-rambu yang sangat jelas terpasang disetiap persimpangan jalan serta jalan yang mulus sampai lokasi.

Hal lain yang dikembangkan adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perhutani dengan Pemkab Banyuwangi. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara

Pemkab Banyuwangi dan Perhutani dalam pengelolaan Pulomerah ditandatangani pada tanggal 16 September 2014 lalu. Kepala Divisi Bisnis Wisata dan Agribisnis Perum Perhutani yakni Ir.Hindro Priatno, MM sebagai Pihak Kesatu dan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi yakni M. Y. Bramuda, S.Sos, MBA, MM sebagai Pihak Kedua.

Perjanjian kerja sama berisi tentang segala hal mengenai pengelolaan seperti pelaksanaan pengelolaan pengembangan wana wisata Pulomerah, tata cara bagi hasil, ketentuan pajak, monitoring dan evaluasi. Perjanjian kerja sama ini memiliki jangka waktu 2 tahun dimulai dari ditandatanganinya perjanjian ini.

Prospek kedepan yang masih dan akan terus dilakukan adalah penjaringan wisatawan lokal dan mancanegara. Hal ini dipermudah karena semakin banyaknya penerbangan mancanegara (Kuala Lumpur, Singapore, Bangkok) ke Denpasar dan Surabaya yang dapat dijaring menuju Pulomerah. Analisis pasar juga perlu dilakukan dibeberapa daerah sekitar Banyuwangi untuk terus dapat meningkatkan kedatangan wisatawan ke Pulomerah.

Berdasarkan data dari pengelola Wana Wisata Pulomerah jumlah pengunjung yang mengunjungi Pulomerah setiap bulannya semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan Pulomerah setiap bulannya. Rincian pendapatan per bulan mulai dari Oktober 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Pendapatan Bulanan Wana Wisata Pulomerah dari Oktober 2014-Maret 2015

No	Tanggal/bulan	Jumlah pengunjung	Jumlah pendapatan
1.	9-31 Oktober 2014	15.822 orang	Rp 94.475.000,-
2.	November 2014	19.478 orang	Rp 129.934.000,-
3.	Desember 2014	71.601 orang	Rp. 552.023.000,-
4.	Januari 2015	20.390 orang	Rp 118.497.000,-
5.	Februari 2015	20.774 orang	Rp. 128.130.000,-
6.	Maret 2015	20.696 orang	Rp. 130.260.000,-
JUMLAH			Rp. 1.153.319.000,-

Sumber: Kantor Pengelola Wana Wisata Pulomerah, 2015

Pendapatan bulanan Pulomerah di dapat dari beberapa pemasukan yakni dari karcis masuk sebesar Rp. 5.000,-/orang, karcis parkir roda dua sebesar Rp. 2.000,- karcis parkir roda empat sebesar Rp. 5.000,- karcis parkir roda enam sebesar Rp. 10.000,- selain dari tiket masuk pendapatan lain juga di dapat dari sewa warung permanen, *home stay*, para pedagang kaki lima (PKL), dan pedagang asongan. Harga sewa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Harga sewa jasa usaha wisata di kawasan Pulomerah

No	Jenis penyewa	Harga sewa
1.	Warung permanen	Rp. 100.000,-/bulan
2.	*Home stay*	Rp. 100.000,-/bulan
3.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	Rp. 50.000,-/bulan
4.	Pedagang asongan	Rp. 10.000,-/datang
5.	Payung teduh	Rp. 100.000,-/bulan

Sumber: Kantor Pengelola Wana Wisata Pulomerah, 2014

4.1.3.2 Sejarah Wana Wisata Pulomerah

Pulomerah mulai dikunjungi oleh wisatawan lokal sejak tahun 2002. Namun, pada saat itu pengelolaan masih dilakukan oleh masyarakat sekitar secara penuh dan belum ada campur tangan dari pihak manapun. Pada awal Pulomerah dikunjungi wisatawan belum ada penarikan tarif masuk sama sekali.

Sejak tahun 2011 Pulomerah mulai dikembangkan secara baik oleh masyarakat sekitar yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pulomerah (POKJA) yang diketuai oleh Pak Rakeh berhasil membuat pembaharuan-pembaharuan di kawasan Pulomerah. Salah satu pembaharuan yang paling terlihat adalah adanya permainan *surfing* di tempat ini. Pak Rakeh sebagai ketua berusaha mencari potensi besar yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menarik wisatawan lokal maupun asing. Beliau memutuskan untuk belajar *surfing* sebagai potensi yang dapat dikembangkan.

Kegiatan *surfing* memang sangat cocok dilakukan di pantai Pulomerah ini karena ombak rata-rata hariannya ± 2m. Namun, usaha pak Rakeh untuk mengembangkan kegiatan *surfing* tidak mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Banyak dari mereka yang mengolok-olok kegiatan *surfing* yang dilakukan Pak Rakeh. Berkat kegigihan beliau dalam mengenalkan kegiatan *surfing* kepada masyarakat sekitar akhirnya masyarakat mulai menerima kegiatan ini.

Pada awal tahun mulai dikembangkannya Pulomerah diberlakukan tarif sebesar Rp 2.500,- yang masuk dalam kas Kelompok Kerja Pulomerah (POKJA). Sejak itu Pulomerah mulai dikenal oleh wisatawan lokal dan wisatawan asing namun masih sangat kecil prosentasenya. Sejak Pulomerah mulai dikenal pengelolaan dijalankan bersama dengan pihak Perhutani sebagai pemilik lahan Pulomerah. Perhutani bersama-sama masyarakat membangun Pulomerah menjadi kawasan yang lebih baik lagi. Pada saat itu sistem bagi hasil sudah diberlakukan yakni sebesar 50-50 bagi Perhutani dan masyarakat sekitar.

Kerja sama antara Perhutani dan masyarakat sekitar berjalan dengan baik. Sekitar tahun 2013 Pulomerah mulai dilirik oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu tempat wisata yang dapat menjadi tambahan pendapatan daerah. Sejak saat itu Pemkab Banyuwangi mulai ikut andil dalam pengelolaan Pulomerah.

Pada awal keikutsertaan pemkab dalam pengelolaan, pemkab mendirikan satu organisasi masyarakat yang bernama yakni Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (POKDARWIS). Kelompok ini beranggotakan dari sebagian masyarakat sekitar yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pulomerah (POKJA). Berdirinya kelompok ini menimbulkan konflik dalam pengelolaan Pulomerah karena keduanya sama-sama ingin menguasai pengelolaan Pulomerah.

Pak Rakeh sebagai ketua Kelompok Kerja Pulomerah (POKJA) berinisiatif untuk menurunkan tingkat ketegangan konflik yang terjadi diantara kedua kelompok ini yang berjalan sampai satu tahun lamanya dengan membubarkan keduanya dan membentuk satu kelompok besar yang diberi nama Kelompok Masyarakat (POKMAS).

Setelah konflik mulai mereda pada tahun 2014 tepatnya tanggal 16 September 2014 ditandatanganilah PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara pihak Perhutani yakni KBM (Kesatuan Bisnis Mandiri) WIJASLING (Wisata dan Jasa Lingkungan) II Jawa Timur dengan Pemkab yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi.

Isi perjanjian ini melibatkan semua hal tentang pengelolaan. Salah satu yang menjadi perhatian dan kembali menimbulkan konflik di masyarakat adalah tata cara bagi hasil. Pada pasal 7 ayat 2 tentang tata cara bagi hasil terdapat pernyataan bahwa nilai bagi hasil sebesar 50% bagi masing-masing pihak, dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah perhutani dan pemkab. Sedangkan masyarakat hanya mendapat 10% dari pendapatan dan harus dibagi antara anggota kelompok yang berjumlah 55 orang. Sampai saat ini konflik tentang pembagian hasil masih terus diperjuangkan oleh masyarakat agar kesejahteraan masyarakat yang harus diutamakan.

4.1.3.3 Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Wana Wisata Pulomerah

Pulomerah saat ini mulai dikenal oleh masyarakat secara luas tidak luput dari campur tangan pemerintah dalam pengelolaannya. Instansi pemerintah yang turut campur dalam hal pengelolaan adalah Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Banyak hal

yang dilakukan untuk menjadikan Pulomerah sebagai tujuan wisata yang dikenal banyak orang.

Peran Perhutani dan Pemkab Banyuwangi dalam pengelolaan Pulomerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Wana Wisata Pulomerah

No	PERAN	
	Perhutani	**Pemkab Banyuwangi**
1.	Membuat *Master Plan* dalam pengembangan Pulomerah	Menyusun *Master Plan* kawasan Pulomerah
2.	Mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana di kawasan Wana Wisata Pulomerah	Mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana di kawasan Wana Wisata Pulomerah
3.	Menganggarkan dalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) untuk pembangunan sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam pengembangan	Menganggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pembangunan saran dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan
4.	Mencetak tiket tanda masuk Wana Wisata Pulomerah	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat sekitar di bidang pariwisata
5.	Menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan kawasan wana wisata Pulomerah	Melakukan penanaman jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi kawasan Wana Wisata Pulomerah
6.	Melaksanakan kegiatan usaha pariwisata secara langsung di kawasan Pulomerah	Memperbaiki akses jalan menuju lokasi wana wisata Pulomerah
7.	Melakukan penanaman jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi kawasan Wana Wisata Pulomerah	Melakukan promosi dan pemasaran Wana Wisata Pulomerah

Sumber: Kantor Pengelola Wana Wisata Pulomerah, 2014

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Peran Perhutani dan Pemkab Banyuwangi tersebut tertera pada Perjanjian Kerja Sama dalam pasal 5 tentang Hak dan Kewajiban yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Hak dan Kewajiban yang telah tertera tersebut terdapat poin yang menyatakan bahwa pihak Pemkab Banyuwangi berkewajiban meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berada dikawasan Pulomerah dalam kegiatan pariwisata. Namun pada kenyataannya kewajiban tersebut belum dipenuhi oleh pihak Pemkab Banyuwangi.

Salah satu poin yang terdapat dalam perjanjian kerja sama juga adanya tatacara bagi hasil antara pihak Perhutani dan Pemkab Banyuwangi dari hasil pendapatan Pulomerah yakni sebesar 50%-50% bagi kedua belah pihak. Masyarakat mendapat 10% dari hasil tersebut yang menimbulkan konflik ketidakpuasan masyarakat akibat kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh pihak Perhutani dan Pemkab Banyuwangi menimbulkan konflik dalam diri masyarakat yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial didalam kehidupan sosial masyarakat.

Berbagai sarana dan prasarana yang terdapat di kawasan Pulomerah saat ini memang sudah cukup memenuhi kebutuhan pengunjung jika bukan musim liburan, namun pada saat musim liburan dengan jumlah pengunjung yang melimpah sarana dan prasana yang ada dianggap sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan pengunjung. Berbagai perbaikan dalam hal pembangunan akan terus dilakukan. Rancangan contoh pembangunan telah dibuat oleh pihak Perhutani dan Dispar dengan bantuan tenaga ahli.

4.2 Proses Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Pulomerah

Pada dasarnya proses perubahan sosial terjadi karena adanya interaksi sosial. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sekitar Wana Wisata Pulomerah terjadi karena adanya interaksi antara masyarakat sekitar dengan

wisatawan yang datang ke Pulomerah. Namun, hal lain seperti adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan, konflik yang terjadi antar masyarakat juga salah satu yang menjadi penyebabnya perubahan sosial.

Berlangsungnya proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sekitar wisata Pulomerah terjadi dengan kisaran waktu yang lumayan singkat. Banyak perubahan yang terjadi dengan cepat akibat adanya kegiatan wisata di tempat ini. Perubahan sosial yang terjadi di Pulomerah memang tidak terlalu mencolok jika dilihat secara kasat mata, namun jika diselidiki secara mendalam banyak perubahan yang telah terjadi dari sebelum adanya kegiatan wisata hingga saat ini menjadi kawasan wisata yang cukup terkenal di kancah nasional maupun internasional.

Menurut Soekanto (1982) proses perubahan sosial dapat dilihat berdasarkan perubahan yang terjadi dalam sistem sosialnya, termasuk di dalamnya struktur sosial, sikap-sikap dan pola-pola perilaku atau gaya hidup diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut proses perubahan sosial dalam penelitian ini dilihat pada struktur sosial, gaya hidup, serta pekerjaan masyarakat sekitar.

1. Proses perubahan pada struktur sosial

Menurut Soekanto (2002) dalam Baliyono (2012) struktur sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik baik antarposisi dan antarperan. Berdasarkan hal tersebut pengertian struktur sosial dapat didefinisikan sebagai suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terkandung hubungan timbal-balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsusr-unsur sosial yang menunjuk pada suatu keteraturan parilaku sehingga dapat memberikan bentuk sebagai suatu masyarakat.

Struktur sosial merupakan hal yang penting yang harus ada dalam tatanan masyarakat, karena struktur sosial yang secara langsung atau tidak, dapat membentuk keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada awalnya sebelum ada kegiatan pariwisata masyarakat sekitar Pulomerah memiliki kehidupan yang harmonis dan rukun satu sama lain. Munculnya kegiatan pariwisata membuat mereka secara tidak sadar mengalami perubahan dalam kehidupan sosialnya seperti semakin jarang mengadakan acara bersama-sama, semakin sibuk dengan kegiatan atau pekerjaannya masing-masing, saling tidak peduli satu sama lain (cuek). Menurut penuturan ibu Dariyah (36 tahun) dalam wawancara yang dilakukan di warung miliknya di Pulomerah pada tanggal 05 April 2015 sebagai berikut:

> "saya sekitar 16 tahun tinggal disini, aslinya memang bukan sini, suami saya yang asli sini, saya aslinya Jawa Tengah. Pulomerah mulai dikelola sekitar 4 tahun, berarti mulai 2011. Sebelum itu ya sudah rame tapi gak serame ini, sebab dulu masih dikelola asli warga sini kalau keliatan udah rame jadi semua instansi ikut semua kerja sama disini. Sebelum ini rame ya rukun tapi sekarang kayak yang sibuk sendiri"

Selain dari kerukunan masyarakat yang semakin berkurang ibu Dariyah juga menuturkan bahwa masuknya campur tangan Pemkab Banyuwangi dalam pengelolaan juga semakin membuat masyarakat merenggang dan pendapatan mereka berkurang. Menurut beliau masyarakat sekitar mulai ditinggalkan dalam pengelolaan pariwisata Pulomerah seperti penuturan beliau dibawah ini:

> "semua instansi ikut semua kerja sama disini kayak pemerintah daerah, terus dinas kehutanan, dinas pariwisata, semuanya ikut di dalamnya sini. Dulu belum rame yo gak, warga sini aja, masyarakat sini yang susah payah bikin sini suapaya maju kan, kalau udah maju ya gitu. Ya sebetulnya ada dampak positifnya juga kalau ada kerja sama instansi seperti makin berkembang, tapi masyarakat sini kayak yang mau ditinggalkan gitu loh"

Meskipun masyarakat mulai memperlihatkan sifat individualisme dan terdapat beberapa konflik yang tejadi antar kelompok dalam pengelolaan, tidak

mempengaruhi kehidupan mereka dalam beragama. Masyarakat Pulomerah yang berasal dari suku serta agama yang berbeda-beda tidak mengalami konflik dalam hal perbedaan agama dan kepercayaan. Mereka tetap saling menghargai satu sama lain, seperti penuturan Ibu Dariyah dibawah ini:

> "gak pernah mbak ada konflik kalau masalah agama, kita semua menyadari kan semuanya gak mau lah berebut atau mempermasalahkan agama, yang penting kita yang orang Islam ya gak pernah bilang gini kalau kamu orang Hindu ya gak pernah bilang kamu anu gini orang Islam, gak pernah, sama semuanya kok. Masalah agama rukun kok kalau disini"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Edy (38 tahun) perwakilan dari pihak Perhutani salah satu pengelola Pulomerah sumber wisatawan yang terbesar adalah dari wisatawan lokal yakni dari kota-kota disekitar Banyuwangi dan masih dalam Provinsi Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, Mojokerto, Jember, Situbondo, dan lain-lain yang memiliki budaya, adat, serta agama yang tidak beda jauh dengan masyarakat asli Pulomerah, hal tersebut menyebabkan tidak terjadinya proses perubahan sosial pada kehidupan beragama masyarakat Pulomerah. Meskipun adanya wisatawan asing dari berbagai belahan dunia seperti Australia, Thailand, Singapore, dan lain-lain masyarakat sekitar juga tidak mengalami proses perubahan dalam hal beragama karena wisatawan asing paling banyak berkunjung hanya pada saat diadakannya Kejuaran *Surfing* Internasional, diluar acara tersebut wisatawan asing yang berkunjung jumlahnya lebih sedikit seperti hasil wawancara dibawah ini.

> "yang banyak ya dari Surabaya, Mojokerto, Malang, Situbondo, Jember, dan lain-lain mbak, yang rame tiap minggu lokalan tapi kalau pas kejuaraan itu ya wisatawan asing dari luar negeri banyak yang datang"

Sebagian besar masyarakat yang tinggal disekitaran Pulomerah memang beragama Islam dan Hindu, namun mereka tetap hidup berdampingan dengan damai. Masyarakat Hindu tetap melaksanakan adat mereka di kawasan wisata

Pantai Pulomerah yakni Upacara Melasti menjelang Hari Raya Nyepi dengan berjalan disepanjang garis pantai Pulomerah, seperti ditunjukan oleh Gambar 7 dibawah ini.

Gambar 7. Upara Melasti menjelang Hari Raya Nyepi di Pulomerah

Tatanan sosial yang tidak berubah kaitannya dengan adanya kegiatan pariwisata adalah kehidupan beragama masyarakat sekitar. Meskipun terdapat banyak wisatawan lokal dan asing yang datang ke Pulomerah, masyarakat sekitar tetap mempertahankan kepercayaan mereka.

Menurut hasil wawancara lain dengan Pak Bambang (25 tahun) pada tanggal 06 April 2015 di pos tiket masuk Pulomerah masyarakat Pulomerah tidak mengalami perubahan pada tatanan kehidupan bermasyarakatnya seperti pada perkataan beliau dibawah ini:

> “tetap saja mbak kalau rukun ya kita tetap rukun. Masih sering juga kumpul-kumpul tapi memang banyak yang sudah bekerja sendiri, ya namanya juga cari uang buat makan mbak tapi kalau masalah rukun ya kita masih tetap rukun kok. Meskipun dulu ada rame-rame antar kelompok itu ya tapi sekarang masyarakat sini sudah bersatu lagi mbak”

Penjabaran yang diberikan oleh Pak Bambang sama halnya dengan penjabaran yang dikemukan Fitri (17 tahun) dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 April 2015 di pos tiket masuk, Fitri mengatakan bahwa sejak

dulu masyarakat Pulomerah sudah rukun dan tetap rukun sampai saat ini, seperti hasil wawancara berikut:

> "dari dulu udah rukun memang mbak, masih sering kumpul-kumpul semua orang muda dan orang tua. Gak ada bedanya mbak disini, yo maksudte semua kumpul bareng-bareng"

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap informan dapat disimpulkan bahwa tatanan masyarakat, hubungan timbal-balik antar masyarakat dalam kehidupan sosialnya serta dalam kehidupan beragamanya tidak terjadi perubahan sosial yang mencolok. Informan menjabarkan bahwa meskipun terdapat kerenggangan antar masyarakat karena adanya konflik namun hal tersebut tidak bertahan lama dan tidak sampai menyebabkan perubahan sosial yang menjadikan terpecahnya tatanan kehidupan sosial masyarakat Pulomerah.

2. Proses perubahan sosial pada gaya hidup

Gaya Hidup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Gaya hidup menunjukkan bagaimana orang mengatur kehidupan pribadinya, kehidupan masyarakat, perilaku di depan umum, dan upaya membedakan statusnya dari orang lain melalui lambang-lambang sosial. Gaya hidup atau *life style* dapat diartikan juga sebagai segala sesuatu yang memiliki karakteristik, kekhususan, dan tata cara dalam kehidupan suatu masyarakat tertentu.

Menurut Soekanto (1982) sikap-sikap dan pola tingkah laku kehidupan sosial masyarakat dapat digunakan untuk melihat terjadinya perubahan sosial masyarakat. Gaya hidup merupakan cara bagaimana masyarakat menjalani kehidupan sosialnya, seperti cara berpenampilan atau berpakaian, penggunaan teknologi, gaya berbahasa dan lain sebagainya. Kawasan wisata merupakan satu kawasan yang rawan terhadap perubahan gaya hidup yang terjadi pada

masyarakat lokal karena adanya pengaruh dari luar seperti wisatawan atau pengunjung yang datang ke tempat wisata tersebut.

Namun, tidak selamanya kedatangan orang luar membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat tertentu. Salah satu contoh yang terjadi di kawasan Wana Wisata Pulomerah ini. Meskipun terdapat beberapa perubahan gaya bicara, yakni penggunaan Bahasa Inggris yang diserap masyarakat sekitar dari wisatawan asing yang datang tidak membuat mereka melupakan bahasa sehari-hari yang biasa digunakan yakni bahasa Jawa. Namun, terdapat perubahan dalam cara berbicara berdasarkan penjelasan Fitri (17 th) dalam wawancara yang diambil di pos tiket masuk pada tanggal 06 April 2015 dibawah ini:

> "banyak lah mbak perubahannya, mungkin cara omongnya lah mbak agak sopan sitik lah mbak, yo maksudte kan iso menghargai karo uwong, kalau ada pengunjung kan bisa mbak agak sopan"

Sebelum adanya Wana Wisata Pulomerah masyarakat sekitar memang memiliki cara berbicara yang keras dan kasar. Hal ini terjadi karena mereka hidup di wilayah pesisir yang membuat mereka beradaptasi dengan hal itu. Setelah dibukanya Pulomerah sebagai kawasan wisata, masyarakat sekitar mulai mencoba berbicara lebih sopan karena banyaknya pengunjung yang datang mengharuskan mereka bersikap lebih sopan jika ingin Pulomerah menjadi semakin ramai.

Beberapa hal seperti cara berpakaian masyarakat sekitar juga tidak berubah mengikuti cara berpenampilan wisatawan asing seperti penuturan Ibu Dariyah dibawah ini:

> "kalau cara berpakaian ya gak, tapi yang ikut-ikutan kebanyakan ya itu orang *surfing* selancar seperti itu malahan, kalau dampak lainnya gak ada. Kita seneng ada tamu asing, sebabnya kita bisa belajar bahasa Inggris, kita belajar bahasa Inggris kita kursus kalau gak secara langsung kita bicara sama orangnya kan gak tau, kita malah yang selalu ketemu ya ngasih makan orangnya bilang saya beli ini

> dalam bahasa Inggris, ow berarti orang ini bilang gini bahasa Inggrisnya ini kita bisa ikutin"

Banyak masyarakat yang mulai menirukan gaya bahasa wisatawan asing dengan belajar berbicara menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, dalam hal penggunaan teknologi banyak masyarakat yang beralih menggunakan *smartphone* dengan akses internet khususnya kalangan remaja meskipun ada beberapa orang dewasa yang saat ini juga menggunakannya.

Perubahan terhadap gaya hidup masyarakat juga terlihat dengan banyaknya masyarakat sekitar yang mulai belajar kegiatan olaharaga *surfing*. Awalnya kegiatan *surfing* memang dipelajari sendiri secara otodidak oleh ketua pengelola Pulomerah yaitu Pak Rakeh (40 tahun). Awal mula beliau memperkenalkan *surfing* tidak diterima oleh masyarakat sekitar, banyak yang olok-olok beliau seperti penuturan beliau dalam wawancara yang dilakukan di kantor pengelola Wana Wisata Pulomerah pada tanggal 05 April 2015 sebagai berikut:

> "dari awal 2011 itu saya sudah tertunjuk sebagai penggiat wisata atau ditunjuk sebagai ketua wisata pengelola. Saya bingung apa yang harus saya kembangkan disini, sedangkan ini adalah hutan. Jadi memang wisata ini belum maju seperti ini atau sebelum kita kelola kita harus bisa menunjukkan apa yang harus kita tunjukkan apa yang ada di masyarakat disini, ternyata disitu adalah *Surfing* karena identic dengan laut. Akhirnya saya belajar *surfing*, akhirnya disini saya belajar sendiri gak ada yang ngajari. Masyarkat sangat membenci dengan *surfing* karena anak-anaknya tenggelam atau apa. ditentang tidak tetapi dia mengolok-olok. Bilang kalau saya itu gila. Rakeh Gila, Bule Hitam, Bule Gendeng!! Tapi saya diam saya tetap berusaha. Akhir-akhirnya saya bisa mendatangkan tamu-tamu bule yang banyak, ya dari saat itu lah bahkan ada kontes kan itu,baru mereka merasa, Oh!!ternyata daerah saya itu bisa dikelola dan bisa dikembangkan pada saat itu lah saya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perhutani langsung berPKS (Perjanjian Kerja Sama) dan sharing. Akhirnya tidak ada tentangan dari masyarakat, tidak ada tentangan dari perhutani, akhirnya sama-sama saling berjalan"

Berdasarkan penuturan beliau dulunya masyarakat sekitar tertutup dengan suatu aktivitas baru, mereka merasa khawatir dengan kegiatan *surfing*

yang belum pernah mereka coba. Namun, berkat kegigihan Pak Rakeh untuk terus berusaha mengembangkan Pulomerah dengan kegiatan *surfing* ini masyarakat sekitar mulai menerima dan menganggap baik kegiatan ini. Saat ini kegiatan *surfing* menjadi salah satu gaya hidup yang dilakukan banyak masyarakat sekitar. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua mulai mempelajari olahraga air yang menantang tersebut.

Kegiatan *surfing* Pulomerah mulai menjadi agenda tahunan dalam festival Banyuwangi sejak tahun 2013. Kegiatan ini membawa dapak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar. Kegiatan *surfing* yang dilakukan di Pulomerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 8. Kegiatan *surfing* yang dilakukan wisatawan dan masyarakat sekitar

Berdasarkan pendapat para ahli gaya hidup dapat menggambarkan adanya perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat seperti yang terjadi pada masyarakat sekitar Wana Wisata Pulomerah. Adanya kegiatan wisata di kawasan Pulomerah dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa masyarakat sekitar wisata mengalami perubahan sosial terhadap gaya hidup mereka. Perubahan-perubahan yang terjadi seperti pada gaya bahasa yang digunakan sehari-hari, kegiatan *surfing* yang menjadi kegiatan harian saat ini.

3. Proses perubahan pada pekerjaan

Perubahan mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau masyarakat berkaitan erat dengan perubahan kelembagaan, perubahan sosial ekonomi dan budaya. Perubahan mata pencaharian terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab yang dapat berasal dari masyarakat sendiri maupun luar masyarakat.

Menurut Gilin dan Gilin dalam Soekanto (1982) Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima, akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat.

Munculnya kegiatan pariwisata dikawasan Pulomerah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat sekitarnya dalam hal pekerjaan. Banyak dari mereka yang beralih pekerjaannya, yang sebelumnya bukan dikawasan wisata sekarang bekerja dalam kawasan wisata Pulomerah.

Beberapa contoh perubahan dalam bidang pekerjaan misalnya Pak Rakeh dan Pak Wawan, dulunya beliau bekerja sebagai nelayan. Saat ini beliau beralih pekerjaan sebagai ketua dan sekretaris pengelola Wana Wisata Pulomerah. Hal yang sama juga dilakukan oleh kebanyakan warga di kawasan Pulomerah seperti yang dituturkan oleh Ibu Dariyah dibawah ini:

> “sebelum dibukanya Pulomerah sebagai tempat wisata dulunya ya ada yang melaut, nelayan sama tani. Saya sendiri tani, setelah Pulomerah dibuka sebagai tempat wisata ya gak tani lagi, buka warung. Ya mulai ada wisata ini mulai dirintis ya orang-orang langsung jualan gitu, pada pindah kerjaan”

Berdasarkan penuturan beliau, masyarakat banyak yang memilih berpindah pekerjaan di kawasan wisata seperti menjadi petugas kebersihan, penjaga keamanan pantai, penjaga tiket masuk, pemilik warung-warung tenda,

berjualan kaki lima dan lain sebagainya dari pada menjadi seorang nelayan seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 9. Warung Semi Permanen

Terdapat sekitar 40 warung semi permanen yang berada dikawasan wisata Pulomerah yang semuanya didirikan oleh masyarakat sekitar Pulomerah dengan membayar harga sewa tempat kepada pihak pengelola sebesar Rp. 100.000,- per bulan. Harga sewa tempat tersebut belum termasuk biaya listrik dan biaya air yang dikeluarkan pemilik tiap bulannya. Perubahan pekerjaan lain juga terlihat dengan adanya pos tiket masuk. Beberapa masyarakat memilih menjadi penjaga pos tiket masuk seperti Pak Bambang yang dapat terlihat pada gambar dan penuturan beliau dibawah ini.

Gambar 10. Pos Tiket Masuk

Menurut Pak Bambang dulunya beliau memiliki pekerjaan sebagai nelayan, namun sejak tahun 2011 dimana mulai diberlakukan penarikan tiket masuk beliau memilih menjadi penjaga pos tiket masuk dan pengurus retribusi Pulomerah dengan hasil wawancara sebagai berikut.

> "saya dulu ya nelayan juga mbak, sama kayak orang lain disini. Tapi pas pulomerah dibuka saya ya gabung sama kelompok kerja itu terus kan kerjanya dibagi saya kebagian jadi penjaga tiket masuk dari awal"

Selain sebagai penjaga pos tiket masuk dan mendirikan warung disekitar Pulomerah, masyarakat juga banyak yang beralih pekerjaan menjadi pemilik payung teduh, pemilik toko souvenir, dan banyak pula masyarakat sekitar yang membangun *home stay* sebagai lahan usaha baru seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 11. Toko Souvenir, Payung Teduh, dan *Home Stay*

Jumlah toko souvenir di kawasan Pulomerah ini baru terdapat 1 toko yang berada didepan pintu masuk Pulomerah, nantinya setelah pengembangan akan ada pembangunan toko souvenir lainnya. Sedangkan untuk payung teduh dan *home stay* jumlahnya sudah cukup banyak. Ketiga bidang usaha tersebut dapat menjadi pilihan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.

Keuntungan ekonomi yang lebih besar juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat sekitar untuk lebih memilih beralih pekerjaan ke bidang pariwisata. Proses perubahan pekerjaan masyarakat sekitar berlangsung cepat karena

masyarakat melihat peluang yang lebih menjanjikan di kawasan wisata Pulomerah.

Banyaknya masyarakat yang mengalami putus sekolah juga menjadikan pemilihan pekerjaan atau pekerjaan menjadi terbatas. Sebagian besar menjadi petugas kebersihan, penjaga tiket masuk serta petugas keamanan yang tidak membutuhkan keahlian khusus dalam melakukannya. Seperti salah satu informan yang bernama Fitri (17 tahun). Fitri hanya lulusan SMP dan saat ini dia tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena ekonomi. Pada awalnya dia mulai bekerja di Hotel Panorama yang berada 1,5 km sebelum Pantai Pulomerah, namun dengan gaji dan pekerjaan yang tidak sebanding saat ini dia memilih menjadi penjaga tiket masuk di kawasan wana wisata Pulomerah. Sejak 6 bulan yang lalu Fitri mulai bekerja di kawasan Pulomerah, alasannya karena pekerjaannya lebih mudah dan lebih santai, seperti penuturannya berikut ini:

> ”dulunya saya kerja di Hotel, Hotel Ponorama. Iya pindah karena gajinya tidak mencukupi, kerjanya juga terlalu sibuk lah, gak bisa santai. Kalau di Pulomerah bisa dapat 400-500 ribu, tergantung pendapatan. Masyarakat sini dulunya sebagian kerjanya jadi nelayan, sebagian menjadi pegawai tambang. Dulu nyarinya uang harus keluar dari desa, kalau sekarang bangun *home stay* aja kan udah dapat uang”

Sekitaran kawasan Pulomerah memang terdapat tambang emas yang saat ini mulai dikelola oleh perusahaan swasta. Tambang emas ini ada sesudah kawasan wisata dibuka, saat mulai ditemukan banyak masyarakat yang mengeksploitasi secara besar-besaran.

Tidak hanya Fitri remaja putus sekolah yang memilih bekerja di kawasan Pulomerah, masih ada beberapa yang lainnya dan alasan mereka lebih memilih bekerja dikawasan Pulomerah juga sama yakni alas an ekonomi dan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus.

Berdasarkan pengertian perubahan sosial yang dikemukan oleh Gilin dan Gilin masyarakat harus menyesuaikan diri dengan adanya perubahan lingkungan. Adanya perubahan ahli fungsi lahan hutan lindung menjadi kawasan wisata maka masyarakat mengalami perubahan dengan menyesuaikan diri beralih pekerjaan. Hasil dari penelitian ini yakni masyarakat juga mengalami perubahan sosial dalam hal pekerjaan. Masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

4.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Pulomerah

Perubahan sosial tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor dari dalam yakni internal masyarakatnya yang ingin berubah atau faktor dari luar yakni ada campur tangan pihak lain dalam proses perubahan sosial yang terjadi.

Kasus perubahan sosial yang terjadi di kawasan Wana Wisata Pulomerah terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor yang mendorong proses perubahan sosial terjadi dengan cepat dan faktor penghambat perubahan sosial.

1. Faktor pendorong proses perubahan sosial di Pulomerah

- Konflik

Konflik yang terjadi antar masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok tertentu semakin mempercepat terjadinya proses perubahan sosial. Banyaknya konflik yang terjadi seperti perpecahan yang terjadi dalam kelompok organisasi masyarakat yang awalnya hanya ada Kelompok Kerja Pulomerah (POKJA) terpecah dengan adanya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang dibentuk oleh Pemkab Banyuwangi. Namun, konflik tersebut sudah dapat terpecahkan dengan membubarkan kedua kelompok dan membentuk satu

kelompok besar yang bernama Kelompok Masyarakat (POKMAS). Konflik lain yakni tidak puasnya masyarakat dengan pembagian hasil pendapatan yang tertera pada Perjanjian Kerja Sama antara pihak Perhutani dan Dinas Pariwisata Banyuwangi. Sebelum adanya perjanjian kerja sama tersebut masyarakat mendapatkan 50% dari hasil pendapatan, saat ini masyarakat hanya mendapat 10% dari hasil pendapatan. Mereka merasa jumlah tersebut sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan. Hal tersebutlah yang menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak Pemkab Banyuwangi yang masih berjalan sampai saat ini.

- Intervensi dari pihak luar (pemerintah kabupaten)

Campur tangan pihak pemerintah kabupaten dalam pengelolaan menjadi salah satu faktor yang mendorong proses perubahan sosial yang terjadi di Pulomerah secara cepat. Banyak masyarakat yang menganggap pemerintah akan meninggalkan masyarakat dalam pengelolaan Pulomerah, karena hal itu menjadi pemicu munculnya konflik-konflik yang menyebabkan perubahan tatanan sosial masyarakat.

- Kontak dengan kebudayaan lain

Datangnya wisatawan lokal maupun asing ke kawasan wisata Pulomerah juga menjadi salah satu faktor pendorong yang cukup cepat dalam perubahan sosial masyarakat. Perbedaan kebudayaan, cara berfikir, cara berpenampilan, gaya bahasa menjadikan interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan saling beradaptasi. Adaptasi yang dilakukan akan membawa perubahan secara tidak langsung.

- Orientasi masa depan

Masyarakat Pulomerah yang dapat melihat peluang lebih baik dikawasan wisata Pulomerah memanfaatkan dengan perubahan pekerjaan yang dilakukan.

Orientasi masyarakat sekitar Pulomerah tentang masa depan adalah mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dan bagaimana membuat Pulomerah semakin banayak pengunjungnya.

- Keinginan masyarakat untuk berubah

Keinginan masyarakat dalam proses pengembangan Pulomerah semakin lebih baik, masyarakat menyadari bahwa ada potensi lain yang dapat dikembangkan yakni kegiatan *surfing*, karena keinginan yang besar masyarakat mau berubah lebih baik dengan mempelajari kegiatan ini. Keinginan ini menjadi salah satu faktor pendorong yang cepat dalam perubahan sosial.

2. Faktor penghambat proses perubahan sosial di Pulomerah

- Hambatan Ideologis

Tatanan kehidupan sosial yang dibangun oleh nenek moyang yang dipercaya tidak dapat diubah dengan mudah, seperti yang ada di Pulomerah. Masyarakat tetap mempertahankan nilai budaya yang selama ini mereka anut. Nilai-nilai budaya serta keagamaan mereka tetap tidak berubah meskipun adanya kegiatan pariwisata di kawasan Pulomerah. Mereka tidak terpengaruh akibat adanya wisatawan yang datang ke tempat ini.

4.3 Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Pulomerah

Secara umum suatu kegiatan pengembangan daerah sebagai daerah wisata akan membawa dampak bagi kondisi alam maupun bagi kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat sekitar daerah tersebut. Begitu pula dengan kawasan wisata Pulomerah, banyak dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan wisata ini. Namun, tidak selamanya dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif, terdapat dampak positif pula yang tejadi akibat perkembangan daerah wisata di Pulomerah.

1. Dampak positif

Perkembangan kawasan wisata Pulomerah membuat masyarakat lebih perhatian terhadap kebersihan, kenyamanan serta keamanan daerah kawasan wisata. Masyarakat sadar bahwa wisatawan akan semakin banyak yang datang jika masyarakat tetap menjaga semua itu. Beberapa hal nampak dilakukan adalah adanya pembagian tugas dari masing-masing kegiatan tersebut, adanya kegiatan penanaman pohon di bagian hutang lindung di sekitar Pulomerah.

Dampak positif lainnya adalah masyarakat tetap mempertahankan warisan budaya nenek moyang mereka. Bagi masyarakat yang beragama Hindu Pulomerah bukan hanya sebuah daerah kawasan wisata, namun juga sebagai tempat suci dilangsungkannya upacara Melasti menjelang Hari Raya Nyepi. Masyarakat yang beragama Hindu tetap menjaga hal ini sampai saat ini. Upacara adat yang dilakukan di Pulomerah ini juga dapat menjadi daya tarik wisata lain bagi pengunjung.

Dampak positif lain terjadi pada segi bahasa masyarakat sekitar Pulomerah, dengan datangnya wisatawan asing yang berkunjung ke Pulomerah menjadikan masyarakat beradaptasi dengan mempelajari bahasa internasional yakni bahasa Inggris. Perubahan bahasa ini termasuk dampak positif karena jika masyarakat bisa menggunakan bahasa Internasional maka wisatawan asing juga akan semakin senang datang ke Pulomerah dan menjadikan pemasukan atau pendapatan masyarakat sekitar semakin meningkat.

Selain itu dampak positif juga terjadi pada segi ekonomi, berdasarkan observasi peneliti keadaan ekonomi masyarakat sekitar Pulomerah mengalami peningkatan. Terbukanya lapangan pekerjaan baru yang ada di kawasan Pulomerah membuat masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Banyak masyarakat yang membuat usaha baru seperti *home stay*. Pemerataan

pendapatan juga telah terjadi di kawasan Pulomerah. Masyarakat sekitar yang mau membuka peluang usaha diberikan ijin dengan mudah. Terdapat pembagian bidang usaha seperti yang dikatan oleh Ibu Dariyah seperti berikut:

> "disini dibagi-bagi lah mbak, kasian!!kalau yang punya warung ya gak punya payung, kalau punya payung ya gak punya warung, kalau *home stay* juga sama. Biar rata, biar bisa usaha di desanya sendiri. Nanti kalau orang Pulomerah gak mau berjualan, gak mau bisnis ya orang luar silakan, yang penting orangnya mau bisnis, kalau gak mau ya diapakan lagi"

Maksud Bu Dariyah adalah masyarakat sekitar disarankan hanya menjalankan satu jenis bidang usaha, jadi terdapat pembagian atau kesempatan bagi orang lain untuk sama-sama mendapatkan penghasilan di kawasan Pulomerah, jika masyarakat sekitar tidak mau membuka usaha dikawasan Pulomerah nantinya aka ada orang luar yang menggunakan kesempatan tersebut.

2. Dampak negatif

Perkembangan wisata Pulomerah tidak hanya menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar, namun juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan pariwisata diantaranya perubahan lingkungan atau alam sekitar. Saat ini banyak alih fungsi lahan yang dilakukan di kawasan wisata seperti pembangunan warung-warung di sekitar kawasan wisata, warung-warung tersebut dulunya adalah lahan hutan lindung yang diratakan. Banyak pedagang kaki lima yang menggunakan lahan yang ditumbuhi bakau disepanjang garis pantai sebagai tempat berjualan yang pada dasarnya akan mengganggu pertumbuhan tanaman bakau.

Dampak negatif pada kondisi lingkungan akan semakin besar dimasa mendatang, karena rencana pengembangan dan pembangunan di Pulomerah

telah dibuat. Rencananya pada tahun 2015 ini pembangunan *cafe*, *resort* dan tempat usaha yang lain akan segera dilaksanakan.

Dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat adanya kegiatan pariwisata di Pulomerah adalah kecendurungan masyarakat yang saat ini mulai individualisme. Mereka lebih mementingkan kehidupannya masing-masing dengan pekerjaan yang telah dilakukan saat ini, waktu untuk berkumpul dan bersosialisasi semakin berkurang. Masyarakat lebih cenderung dan memprioritaskan untuk mencari kebutuhan ekonomi daripada berkumpul bersama.

Hal lain yang dapat menjadi dampak negatif adalah adanya penjualan minuman keras di kawasan Pulomerah. Meskipun penjualan dilakukan tidak terang-terangan namun para pemilik warung tetap menyediakan minuman keras. Alasann dijualnya minuman keras karena mereka sudah dapat ijin dari Bupati, alasan lain karena kawasan Pulomerah dianggap sudah bertaraf Internasional jadi banyak wisatawan asing yang datang, seperti penuturan Ibu dariyah dibawah ini:

> “ya kadang kala ada orang minum tapi ya gak semata diliatin, kalau kepengen gitu kadang ya sembunyikan di dalam tapi gak diliatin. Sebabnya kan Bupatinya sudah menyarankan kita boleh jualan bir tapi gak boleh didepan sebabnya ini kan wisata internasional, jadinya kan ya kalau ibaratnya nanti ada tamu dari luar nanti tanya bir kalau gak ada kan gimana. Jualan boleh tapi gak boleh ditaruh didepan dipajang, kita sembunyikan aja nanti kalau ada yang tanya kita kasih”

Adanya penjualan minuman keras di kawasan Pulomerah secara tidak langsung masyarakat sekitar akan mulai mencoba atau ingin merasakan minuman ini. Pada kalangan remaja Pulomerah terdapat banyak anak putus sekolah dan bekerja dikawasan ini, tidak baik bagi psikologi mereka jika dikenalkan dengan minuman keras. Akan terdapat masalah-masalah kenakalan remaja jika hal ini tetap berlanjut.

Tabel 10. Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Pulomerah

a. Dampak Positif			
No	**Dampak yang terjadi**	**Sebelum**	**Sesudah**
1	Kebersihan	Masyarakat cenderung tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan	Masyarakat mulai menyadari bahwa kebersihan penting
2	Budaya dan adat	Masyarakat menjalankan warisan budaya dan adat dari nenek moyang	Masyarakat tetap menjaga dan melestarikan warisan budaya dan adat dari nenek moyang
3	Bahasa	Masyarakat menggunakan bahasa lokal yakni bahasa jawa dan nada bicara sedikit keras	Masyarakat mulai belajar bahasa asing yakni bahasa Inggris dan mulai lebih sopan dalam berbicara
4	Ekonomi	Penghasilan dari pekerjaan sebagai nelayan tidak terlalu besar dan tidak ada pembagian kerja	Penghasilan yang didapat dengan pekerjaan baru dikawasan wisata cukup besar dan terjadi pemerataan pembagian bidang usaha
5	Lowangan pekerjaan	Rata-rata masyarakat bekerja sebagai nelayan dan petani	Terbukanya lowongan pekerjaan baru di area Wana Wisata Pulomerah
b. Dampak Negatif			
No	**Dampak yang terjadi**	**Sebelum**	**Sesudah**
1	Lingkungan	Kawasan hutan lindung	Kawasan hutan lindung alih fungsi menjadi kawasan wisata
2	Kehidupan sosial	Kehidupan sosial berjalan lancar dengan banyak melakukan aktivitas bersama-sama	Adanya sifat individualisme yang terjadi dikalangan masyarakat
3	Psikologi	Tidak ada penjualan minuman keras dikawasan Pulomerah	Adanya penjualan minuman keras yang dapat mengganggu psikologi kalangan remaja yang ingin mencoba-coba

Sumber: Data yang diolah, 2015

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perubahan sosial masyarakat sekitar wisata di kawasan Wana Wisata Pulomerah Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Adanya Wana Wisata Pulomerah menyebabkan terjadinya proses perubahan sosial dikalangan masyarakat sekitar. Pada struktur sosial masyarakat Pulomerah tidak mengalami proses perubahan yang mencolok jadi tidak dapat dikategorikan mengalami perubahan sosial dalam struktur sosial, sedangkan pada gaya hidup dan pekerjaan masyarakat Pulomerah mengalami proses perubahan sosial yang jelas terlihat dalam kurun waktu beberapa tahun.
2. Dampak positif sosial ekonomi yang diakibatkan adanya Wana Wisata Pulomerah terjadi pada segi kepedulian terhadap kebersihan, bahasa sehari-hari yang digunakan, budaya dan adat yang tetap dipertahankan, meningkatnya penghasilan masyarakat sekitar, terbukanya lowongan pekerjaan baru. Dampak negatif yang terjadi adalah lingkungan yang mengalami alih fungsi lahan, munculnya sifat individualisme pada masyarakat serta, pengaruh psikologis remaja karena adanya penjualan minuman keras.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian perubahan sosial terhadap masyarakat sekitar wisata Pantai Pulomerah adalah sebagai berikut:

- Masyarakat sekitar Pulomerah

  Sebaiknya masyarakat sekitar harus tetap mempertahankan dan melestarikan warisan budaya serta adat nenek moyang meskipun terdapat wisatawan asing yang datang, serta dapat memilah mana dampak positif yang seharusnya terus dikembangkan dan dampak negatif yang harus ditanggulangi dengan adanya kegiatan wisata.

- Pemerintah

  Sebaiknya pemerintah melalui Perhutani dan Pemkab melalui Dispar dapat menyiapkan masyarakat menghadapi kegiatan dan lingkungan pariwisata yang ada di Pulomerah misalnya dengan melakukan pelatihan-pelatihan dalam bidang usaha pariwisata.

- Peneliti

  Diharapkan adanya penelitian lanjutan dengan tema perubahan sosial masyarakat perikanan ditempat lain oleh peneliti selanjutnya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Agusta, I. 2003. **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif**. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian. Bogor.

Black, J dan Champion, D. 1992. **Metode dan Masalah Penelitian Sosial**. PT Refika Aditama. Bandung.

Irianto. 2011. Dampak Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Di Gili Trawangan Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan . Vol 7. No 3. STIE AMM Mataram.

Jaya, A, Ambo T. dan Mahatma. 2012. Kajian Kondisi Lingkungan dan Perubahan Sosial Ekonomi Reklamasi Pantai Losari dan Tanjung Bunga. Universitas Hasanuddin. Makasar.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. 2013. Pariwisata sebagai penyumbang devisa Negara. Diakses di http://www.kemenkraf.us/2013/09/Pariwisata-sebagai-penyumbang-devisa-negara pada tanggal 1 Desember 2014

Bagus. 2013. Azwar Anas : Ekowisata Adalah Masa Depan Pariwisata Indonesia. Diakses di http://www.banyuwangi.us/2013/09/azwar-anas-ekowisata-adalah-masa-depan.html pada tanggal 1 Desember 2014.

Luthfi, R. 2013. Peran Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Sektor Lapangan Pekerjaan dan Perekonomian Tahun 2009-2013 (Studi Kasus:Kota Batu). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang.

Marzuki. 1983. **Metodologi Riset Fakultas Ekonomi**. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Nazir, M. 1999. **Metode Penelitian**. Ghalia. Jakarta.

Noerhadi, H.T. 1998. **Psikologi pariwisata/glenn ross**. Yayasan obor Indonesia. Jakarta

Nugroho, I. 2004. **Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Pendit, S. 1999. **Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana**. PT Pradnya Paramita. Jakarta

Prayogi, P. 2011. Dampak Perkembangan Pariwisata Di Objek Penglipuran. Jurnal Perhotelan dan Pariwisata, Vol. 1 No.1 hal 64

Priyo, B. 2012. Pengertian Struktur Sosial menurut para ahli & Penjelasan. Diakses di http://priyobaliyono.blogspot.com/2012/08/pengertian-struktur-sosial-menurut-para.html pada tanggal 6 Juni 2015

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Rakhmat. 1998. **Metode Penelitian Komunikasi**. PT Remaja Rosadakarya. Bandung.

Resi. A, Soesilo. Z, dan Ismani. 2009. Birokrasi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan. Jurnal Wacana Vol. 10 No. 1

Salim, A. 2002. **Perubahan Sosial: sketsa teori dan refleksi metodologi kasus Indonesia**. PT Tiara Wacana. Yogyakarta.

Sari, P. 2007. Perubahan Sosial Desa Jatiarjo (Studi Kasus Kehadiran Taman Safari Indonesia II Prigen Bagi Masyarakat dan Makna Pendidikannya). Universitas Negeri Malang.

Soekanto, S. 1982. **Sosiologi Suatu Pengantar**. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Soemarwoto, O. 2009. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta

Sudiro, A. 2012. Metode Penelitian. Dapat diakses di http://achmadsudirofebub.lecture.ub.ac.id/2012/02/100/ **pada tanggal 23 Desember 2014**

Sztompka, P. 1993. **Sosiologi Perubahan Sosial**. Prenada Media. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Vanclay, F. 2003. International Principles For Social Impact Assessment. Volume 21 No 1 hal 5-11. Inggris

Wahyu. 2005. **Perubahan Sosial dan Pembangunan**. PT Hecca Mitra Utama. Jakarta

Yin, R.K. 2013. **Studi Kasus Desain & Metode**. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Yoeti, A. 1989. **Pengantar Ilmu Pariwisata**. PT Pradnya Paramita. Jakarta

Zulfa. 2013. Pengertian, Tujuan, Manfaat Analisa Data. Diakes di http://ahlianalisadata.blogspoy.com/2013/04/pengertian-tujuan -analisa-data.html pada tanggal 21 Oktober 2014

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Ranking Nilai Devisa Pariwisata

Rank	2010		2011		2012		2013	
	Jenis komoditas	Nilai (juta US$)	Jenis komoditas	Nilai (juta US$)	Jenis komoditas	Nilai (juta US$)	Jenis komoditas	Nilai (juta US$)
1	Minyak dan gas bumi	28,039.60	Minyak dan gas bumi	41,477.10	Minyak dan gas bumi	36,977.00	Minyak dan gas bumi	32,633.20
2	Batu bara	18,499.30	Batu bara	27,221.80	Batu bara	26,166.30	Batu bara	24,501.40
3	Minyak kelapa sawit	13,468.97	Minyak kelapa sawit	17,261.30	Minyak kelapa sawit	18,845.00	Minyak kelapa sawit	15,839.10
4	Karet olahan	9,314.97	Karet olahan	14,258.20	Karet olahan	10,394.50	Pariwisata	10,054.10
5	Pariwisata	7,602.45	Pariwisata	8,554.40	Pariwisata	9,120.85	Karet olahan	9,316.60
6	Pakaian jadi	6,598.11	Pakaian jadi	7,801.50	Pakaian jadi	7,304.70	Pakaian jadi	7,501.00
7	Alat listrik	6,337.50	Alat listrik	7,364.30	Alat listrik	6,481.90	Alat listrik	6,418.60
8	Tekstil	4,721.77	Tekstil	5,563.30	Tekstil	5,278.10	Makanan olahan	34.8
9	Kertas dan barang dr kertas	4,241.79	Makanan olahan	4,802.10	Makanan olahan	5,135.60	Tekstil	5,293.60
10	Makanan olahan	3,620.86	Bahan kimia	4,630.00	Kertas dan barang dr kertas	3,972.00	Kertas dan barang dr kertas	3,802.20
11	Bahan kimia	3,381.85	Kertas dan barang dr kertas	4,214.40	Bahan kimia	3,636.30	Kayu olahan	3,514.50
12	Kayu olahan	2,870.49	Kayu olahan	3,288.90	Kayu olahan	3,337.70	Bahan kimia	3,501.60

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2013

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WANA WISATA PULOMERAH
ANTARA
PERUM PERHUTANI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

PERHUTANI

Nomor : 01/PKS/DIV-WIS&AGRI/2014
Nomor : 188/ 1976 /429.012/2014

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu empat belas(16-9-2014), bertempat di Banyuwangi Jawa Timur, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

1. **Ir. HINDRO PRIATNO, MM** : Kepala Divisi Bisnis Wisata dan Agribisnis Perum Perhutani yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 628 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/SKK/KUM/DIR/2014 tanggal 15 September 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** ; ----------

2. **M. Y. BRAMUDA, S.Sos ,MBA, MM** : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 78 Banyuwangi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/378/KEP/429.011/2014, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;----------

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : ----------

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan pelimpahan wewenang dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di kawasan hutan negara di wilayah kerjanya kecuali hutan konservasi ;----------
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki program pembangunan kepariwisataan di wilayahnya.----------
3. Bahwa dalam rangka mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Banyuwangi PARA PIHAK ingin mengembangkan Wisata Pulomerah ----------

Selanjutnya, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Wana Wisata Pulomerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat umum sebagai berikut : ----------

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;----------

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah denganUndang – Undang Nomor 12 tahun 2008 ----------
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ----------
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;----------
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; ----------
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 ----------
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ;----------
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam;----------
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;------
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 ;----------
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2012 ;------
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Menteri Dlaam Negrei Nomor 59 Tahun 2007 ;----------
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.50/Menhut – II/2006 tentang Pedoman Kegiatan Kerjasama Usaha Perum PerhutaniDalam Kawasan Hutan;----------
15. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 460/Kpts/Dir/2009 tentang Pedoman Pengusahaan Pariwisata Alam;----------
16. Nota Kesepakatan (MoU) antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 021/SJ/DIR/2014 dan 188/821/429.012/2014 tanggal 5 Mei 2014----------

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program kegiatan PARA PIHAK dalam upaya pengembangan potensi pariwisata dalam kawasan hutan yang dikelola PIHAK KESATU, guna mendukung pembangunan kepariwisataan di wilayah PIHAK KEDUA; ----------

(2) Tujuan kerjasama ini adalah mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial dan ekonomi atas kawasan hutan yang dikelola PIHAK KESATU dan untuk meningkatkan pendapatan PARA PIHAK serta masyarakat di sekitar obyek wisata, dengan teteap memperhatikan kelestarian hutan;----------

Pasal 3

OBJEK DAN LOKASI

(1) Obyek kerjasama ini adalah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wana Wisata Pulomerah yang berada pada kawasan hutan yang dikelola PIHAK KESATU. ----------

(2) Lokasi Wana Wisata Pulomerah yang dikerjasamakan terletak di kawasan hutan lindung Petak 70n luas 3,46 Ha RPH Pulomerah BKPH Sukamade dan Petak 75m luas 3,40 Ha RPH Kesilir Baru BKPH

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

(3) Lingkup Kerjasama :

a. Penyusunan *Master Plan* pengembangan kawasan Wisata Pulomerah ;----------

b. Pengelolaan Tiket Masuk;----------

c. Usaha jasa tempat parkir kendaraan ;----------

d. Usaha jasa wisata lainnya ;----------

e. Pembangunan sarana dan prasarana ;----------

f. Promosi dan pemasaran ;----------

g. Pemeliharaan dan pengamanan lokasi Wana Wisata dan sekitarnya ;----------

h. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ;----------

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU**berhak :----------

a. Memperoleh seluruh hasil pendapatan kotor dari pengelolaan obyek dalam kawasan wisata sebelum diperhitungkan besarnya sharing ----------

b. Memperoleh bagi hasil yang diatur dalam pasal tersendiri ----------

c. Mendapatkan promosi dan pemasaran Wana Wisata Pulomerah dari PIHAK KEDUA ; ----------

d. Memperoleh peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dari PIHAK KEDUA ;----

(2) **PIHAK KESATU**berkewajiban :----------

a. Bersama–sama PIHAK KEDUA menyusun *Master Plan* pengembangan kawasan Wana Wisata Pulomerah. ----------

b. Bersama–sama PIHAK KEDUA mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana di kawasan Wana Wisata Pulomerah. ----------

c. Menganggarkan dalam RKAP untuk pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan Wana Wisata Pulomerah sesuai ketentuan yang berlaku. ----------

d. Mencetak tiket tanda masuk Wana Wisata Pulomerah ----------

e. Memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan kondisi lokasi kegiatan wisata di wana wisata Pulomerah----------

f. Bersama - sama PIHAK KEDUA menjaga kebersihan , kenyamanan dan keamanan kawasan wana wisata Pulomerah dan sekitarnya; ----------

g. Bersama – sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan usaha pariwisata di kawasan Wana Wisata Pulomerah; ----------

h. Melakukan penanaman jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi kawasan Wana Wisata Pulomerah;----------

i. Memberikan bagi hasil dari hasil kegiatan Wana Wisata Pulomerah kepada PIHAK KEDUA;----------

j. Bersama – sama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama;----------

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak:----------

a. Mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KESATU yang berkaitan dengan kondisi lokasi Wana Wisata Pulomerah; ----------

b. Memperoleh bagi hasil yang diatur dalam pasal tersendiri ----------

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :----------

a. Bersama – sama PIHAK KESATU menyusun *Master Plan* Kawasan Wana Wisata Pulomerah; ----------

b. Bersama–sama PIHAK KESATU mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana di kawasan Wana Wisata Pulomerah. ----------

c. Menganggarkan dalam APBD untuk pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan Wana Wisata Pulomerah sesuai ketentuan yang berlaku. ----------

d. Bersama - sama PIHAK KESATU menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan kawasan wana wisata Pulomerah dan sekitarnya; ----------

e. Mempromosikan dan memasarkan obyek wisata Wana Wisata Pulomerah ; ----------

f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia PIHAK KESATU dan masyarakat sekitarnya di bidang parwisata; ----------

g. Melakukan penanaman jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi kawasan Wana Wisata Pulomerah;----------

h. Bersama – sama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelakasanaan kerjasama; ----------

i. Bersama – sama PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan usaha pariwisata di kawasan Wana Wisata Pulomerah. ----------

Pasal 6

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WANA WISATA PULOMERAH

(1) Pengelolaan dan pengembangan Wana Wisata dilaksanakan PARA PIHAK dengan melibatkan Lembaga Masyarakat yang berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.----------

(2) Keterlibatan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur oleh PARA PIHAK.–

(3) Dalam hal terdapat investasi baru baik dari PARA PIHAK maupun dari pihak lain, maka harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK. ----------

(4) Pembukuan dari hasil Pengelolaan pada Wana Wisata Pulomerah dilakukan PIHAK KESATU.----------

(5) Pembukuan pendapatan dilakukan setiap hari dan ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk PARA PIHAK. ----------

(6) Pengeluaran biaya untuk operasional harus sepengetahuan PARA PIHAK. ----------

Pasal 7

TATA CARA BAGI HASIL

(1) **PARA PIHAK** akan mendapatkan bagi hasil dari penjualan tiket masuk, usaha jasa tempat parkir kendaraan, dan kegiatan jasa usaha lainnya di Wana Wisata Pulomerah;----------

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

(2) Nilai bagi hasil yang dibagikan kepada PARA PIHAK adalah semua pendapatan yang diperoleh dari tiket masuk, usaha jasa tempat parkir dan jasa usaha lainnya setelah dikurangi pajak, asuransi dan biaya oprasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibagi untuk masing-masing pihak sebesar 50% (lima puluh persen). ----------

(3) Dalam hal terdapat investasi baru, maka pembagian nilai bagi hasil akan dilakukan penyesuaian berdasarkan besarnya investasi masing-masing pihak. ----------

(4) Penyerahan bagi hasil akan dilaksanakan setiap bulan yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;----

(5) Penyerahan bagi hasil kepada PIHAK KEDUA akan disetor kepada Kas Daerah Kabupaten Banyuwangi padaBank Jatim dengan Nomor Rekening 002.1000.700;----------

Pasal 8

KETENTUAN PAJAK

Pajak – Pajak yang akan timbul akibat perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ;----------

Pasal 9

SUMBER DAYA MANUSIA

(1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai keahlian di bidang administrasi dan keuangan yang diperlukan ;----------

(2) Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK dan masyarakat sekitarnya, PIHAK KEDUA akan menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata minimal 1 (satu) kali dalam setahun;--------

Pasal 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.----------

(2) Pembahasan perpanjangan perjanjian kerjasama dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir. ----------

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** akan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama setiap 3 (tiga) bulan sekali;----------

(2) Evaluasi akan dilakukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir ;--------

(3) Berdasarkan hasil evaluasi, maka **PARA PIHAK** berhak melakukan penilaian dan tindak lanjut hasil evaluasi;----------.----------

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 12

LARANGAN

(1) PARA PIHAK tidak dilarang mengalihkan kepada pihak lain manapun baik sebagian maupun secara keseluruhan dari obyek yang dikerjasama dalam Perjanjian ini.----------

(2) PARA PIHAK dilarang menjaminkan/mengagunkan baik sebagian maupun seluruhnya dari objek kerjasama dalam Perjanjian ini kepada pihak bank atau manapun.----------

(3) PIHAK KEDUA dilarang mengubah dan/atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan (pal batas, alur dan lain – lain) yang ada pada kawasan hutan yang dikerjasamakan, kecuali dalam hal PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan rekonstruksi batas secara rutin setiap 10 (sepuluh) tahun sekali ;----------

Pasal 13

WANPRESTASI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) Dalam hal pemutusan perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyampingkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 1266 dan 1267 kitab Undang-undang Hukum Perdata;----------

(2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan perjanjian kerjasama ini secara sepihak;----------

(3) Dalam hal PIHAK KESATU melakukan wanprestasi sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK KEDUA dapat memutuskan perjanjian kerjasama ini secara sepihak ;----------

(4) Mekanisme pemutusan perjanjian dilakukan setelah dilakukan teguran dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya,berupa surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing surat teguran 1 (satu) bulan;----------

(5) Teguran / peringatan yang dimaksud ayat (3) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA atau PIHAK KESATU** melakukan ;----------

a. Secara langsung atau tidak langsung sengaja mengadakan kegiatan usaha yang dapat merugikan pihak lainnya;----------

b. Memberikan keterangan tidak benar yang dapat merugikan salah satu pihak sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini;----------

c. Menyerahkan pelaksanaan pengelolaan wana wisata kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan pihak lainnya;----------

Pasal 14

KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) Salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, apabila pihak atau PARA PIHAK tersebut mengalami hambatan yang disebabkan karena keadaan kahar / *force majeure*, sehingga pihak yang mengalami hambatan keadaan kahar / *force majeure* harus dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang dan resiko yang terjadi menjadi resiko masing-masing pihak. ----------

(2) Yang dimaksudkan dengan keadaan kahar / *force majeure*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan atau peristiwa yang meliputi tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, angin topan, petir, banjir besar, wabah penyakit, pemogokan massal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, perang, sabotase, huru-hara, kebakaran dan sejenisnya.----------

(3) Kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena keadaan kahar / *force majeure* bukan merupakan resiko dan/atau tanggung jawab pihak lainnya, dan kedua belah pihak dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut terhadap resiko atau akibat *keadaan kahar* / force majeure. ----------

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

(4). Pihak yang terkena keadaan kahar / force majeure wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak terjadinya keadaan kahar / *force majeure.*----------

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan yang terjadi antara **PARA PIHAK** berkaitan pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat melalui perundingan antara **PARA PIHAK.**----------

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). ----------

Pasal 16

KERAHASIAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dokumen – dokumen milik pihak lain, termasuk peta – peta yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini ;----------

Pasal 17

KETENTUAN LAIN

(1) Perjanjian kerjasama ini tidak dapat diubah ataupun diganti yang dapat berpengaruh terhadap akibat hukum dan kekuatan hukum perjanjian ini, kecuali disepakati dan dinyatakan secara tertulis serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;----------

(2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.----------

Pasal 18

P E N U T U P

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, masing-masing bermeterai cukup,dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK.**----------

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 66280ACF488439449 ENAM RIBU RUPIAH 6000	
M. Y. BRAMUDA, S.Sos ,MBA, MM	**Ir. HINDRO PRIATNO, MM.**